

**IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN  
BEBAS DALAM TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

**ARDIANSYAH**  
**NIM. 10500110021**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN  
BEBAS DALAM TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks)**

Oleh

**ARDIANSYAH**  
**NIM. 10500110021**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/Pid.B/2010/PN.Makassar) yang disusun oleh ARDIANSYAH, NIM: 10500110021, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2014 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.	(.....)
Sekretaris	:	Dra. Sohrah, M.Ag.	(.....)
Penguji I	:	Dr. Hamsir, SH., M.Hum.	(.....)
Penguji II	:	Ahkam Jayadi, SH.,MH.	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Jumadi, SH.,MH.	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.**  
NIP. 19570414 198603 1 003

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun selalu semangat dan kuat dalam menyelesaikan karya ilmiah penyusunan skripsi ini yang berjudul ***Implementasi Upaya Hukum Kasasi Pada Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks)***.

Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw serta keluarga yang tercinta dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau.

Adapun maksud dari penyusunan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penyusunan ini penyusun mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penyusun peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta hasil penelitian penyusun di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

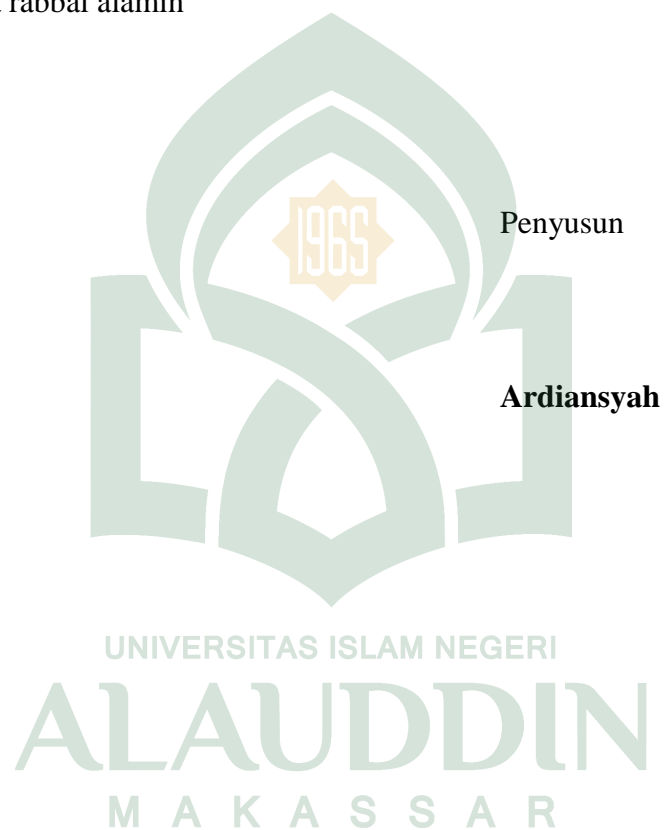
2. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Hamsir, SH.M.Hum, Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Ibu Istiqamah, SH.,MH., serta staf jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan karya ilmiah ini.
3. Bapak Dr. Jumadi, SH.,MH., selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi Ilmu terkait judul yang diangkat penyusun dan Bapak Dr. H. Kasjim, SH., M.Th.I. sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait judul yang diangkat penyusun.
4. Bapak Pudjo Hunggul, SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pembimbing saya di Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait judul yang diangkat penyusun.
5. Bapak Mustari selaku staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak membantu selama proses penelitian penyusun di Pengadilan Negeri Makassar.
6. Ibu Andi Armasari, SH., MH., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pembimbing saya di Kejaksaan Negeri Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait judul yang diangkat penyusun.
7. Kedua orang tua yang saya cintai dan hormati Bapak Yunus T, dan Ibu Unsila Kasim yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya sejak lahir hingga dewasa ini, mengajarkan arti hidup, memberikan segalanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan saya sejak kecil hingga saat

ini, semua jasa orang tua yang telah membiayai pendidikan saya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang dengan penuh perhatian mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua jasa-jasanya yang tidak akan mampu saya tuliskan dalam kata pengantar ini, karena begitu banyak pengorbanan yang dilakukan kedua orang tua saya. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan dan membalas semua yang kalian berikan kepada saya.

8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2010 khususnya Ilmu Hukum 1.2 terima kasih atas kebersamaan kalian semua selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang telah banyak memberikan masukan dan arti kebersamaan kepada saya.
9. Teman-teman seperjuangan serta Para Pelatih Delegasi UIN Alauddin Makassar pada Nasional Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana II Universitas Udayana Bali 2012 yang telah memberikan banyak motivasi kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman pengurus maupun anggota Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan masukan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Profesi UIN Alauddin Makassar Angkatan IV tahun 2013 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala RW 03 yang telah banyak memberikan motivasi kepada saya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhir kata penyusun berharap kiranya tugas penyusunan karya ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum acara pidana, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pemerintah khususnya bagi penegak hukum.

Amin yaa rabbal alamin



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
1. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ..	7
2. Upaya Hukum .....	9
3. Putusan Bebas ( <i>Vrijspreek</i> ) .....	10
4. Putusan Bebas Murni ( <i>Zuivere Vrijspreek</i> ) dan Putusan Bebas Tidak Murni ( <i>Onzuivere Vrijspreek</i> ) .....	11
E. Tujuan dan Kegunaan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Putusan Bebas ( <i>Vrijspreek</i> ) yang dimintakan Upaya Hukum .....	13
1. Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan .....	13
2. Kasasi dan Tujuannya .....	13
3. Dasar Hukum dan Alasan Kasasi .....	16
4. Kasasi Terhadap Putusan Bebas .....	18
B. Konsekuensi Hukum Terhadap Upaya Hukum Kasasi Mengenai Putusan Bebas Pengadilan Negeri.....	21
C. Kerangka Konseptual .....	23
D. Landasan Teori.....	25
1. Pidana .....	25
2. Tindak Pidana.....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
4. Putusan Pengadilan.....	35
5. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan .....	38
6. Putusan Pemidanaan ( <i>veroordeling</i> ) .....	38



7. Putusan Bebas ( <i>Vrijspreek</i> ) .....	41
8. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum ( <i>Onslag van alle rechtvervolging</i> ) .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Sumber Data .....	51
D. Metode Pengumpulan Data .....	52
E. Instrumen Penelitian .....	52
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pelaksanaan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspreek</i> ) .....	53
B. Konsekuensi Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspreek</i> ) .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>

## ABSTRAK

**Nama** : Ardiansyah  
**NIM** : 10500110021  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Judul** : Implementasi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana” (Studi Kasus Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks)

---

Skripsi ini membahas masalah Implementasi Upaya Hukum Kasasi Pada Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Makassar). Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui upaya hukum kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum pada putusan bebas dalam tindak pidana.

Metode yang digunakan dalam penyusunan ini pengumpulan data melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Pustaka (*Library Research*) yakni mempelajari Undang-Undang maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi pada putusan bebas dalam tindak pidana. Disamping itu penulis juga mengumpulkan literatur dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi pada putusan bebas dalam tindak pidana. Sementara Penelitian Lapangan dilakukan dengan wawancara narasumber terkait yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar dan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus Nomor:576/PID.B/2010/PN.Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim dalam putusannya ternyata terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta dipersidangan jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan salah satu unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum.

Putusan bebas murni maupun putusan bebas tidak murni jaksa penuntut umum dapat langsung memintakan pemeriksaan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan pertimbangan situasi, kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Dalam hukum acara pidana bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Maka isi putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tindakan tata tertib, putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Terhadap isi putusan hakim yang merupakan salah satu dari tiga kemungkinan tersebut di atas maka kepada para pihak yang terkait dalam suatu perkara merasa tidak puas atas putusan hakim. Maka tersedia upaya hukum baik berupa upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali dengan maksud untuk dimintakan kepada badan peradilan yang lebih tinggi untuk menguji apakah putusan hakim pada pengadilan di bawahnya sudah sesuai dengan aturan hukum dan asas-asas hukum yang ada.

Upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.<sup>1</sup>

Namun khusus untuk putusan bebas sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan di dalam pasal 244 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Praktek Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1987), h.3.

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap *putusan bebas*.”

Dalam praktiknya Jaksa/Penuntut Umum selalu tidak mengindahkan ketentuan ini, karena sering sekali putusan bebas oleh Penuntut Umum tetap diajukan kasasi. Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh jaksa selalu menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menilai langkah jaksa ini melanggar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena seperti yang telah disebutkan di atas Pasal 244 KUHP secara tegas menyatakan terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan upaya kasasi. Akan tetapi sebagian lagi menilai bahwa kasasi terhadap putusan bebas memang seharusnya diperbolehkan.

Moerino salah satu calon hakim agung dari jalur karir berpendapat bahwa kasasi terhadap putusan bebas merupakan terobosan hukum, dan telah menjadi yurisprudensi. Namun ia mengatakan mengabulkan kasasi terhadap putusan bebas tidak bisa sembarangan. Syaratnya jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa bukan dinyatakan bebas murni oleh Pengadilan Negeri. Lebih lanjut lagi Moerino menilai yurisprudensi itu bertujuan untuk mengoreksi putusan hakim Pengadilan Negeri. Bila tidak diberikan ruang koreksi melalui kasasi maka hakim Pengadilan Negeri dikhawatirkan akan sewenang-wenang dalam membebaskan terdakwa.

Bila ditinjau dari sisi penuntut umum, keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya terutama keluarga korban. Mereka akan merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan, kondisi seperti ini dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap pengadilan dan akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan. Satu-satunya cara agar keadilan dapat tercapai adalah dengan mengajukan upaya hukum dalam hal ini kasasi.

Sebaliknya terdakwa yang diputus bebas tentu akan sangat merasa dirugikan apabila penuntut umum mengajukan kasasi. Ini juga dapat menimbulkan suatu ketidakpercayaan lagi terhadap putusan hakim. Sebagai contoh dari penelitian terhadap 120 narapidana yang dilakukan oleh Prof. Muladi S.H. sekitar tahun 1985 hampir 50% napi mengatakan bahwa putusan hakim masih kurang sesuai dengan yang seharusnya.<sup>2</sup> Apabila dihubungkan dengan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas tentu angka ini akan semakin bertambah.

Keadaan yang semakin simpang siur ini menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum sangatlah diperlukan bagi masyarakat, karena tanpa hukum yang pasti maka hukum akan sulit ditegakkan. Beberapa putusan dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat, juga telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya dan ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan.<sup>3</sup>

Kondisi demikian sangatlah perlu untuk dicari solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan dalam peradilan, terutama putusan bebas dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi peradilan.

---

<sup>2</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1992), h. 272.

<sup>3</sup>Poentang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), h. 6.

Adapun yang menjadi fokus kajian terkait dengan penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim dalam relevansinya dengan upaya hukumnya, yakni putusan hakim yang mengandung pembebasan berupa kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara tataran teoritis masih tetap menjadi wacana yang berkepanjangan.

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP sebagai berikut: Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut pada kalimat bagian terakhir secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Ironisnya setelah perjalanan diberlakukannya KUHAP terjadi arus frekuensi putusan bebas (*vrijspraak*) yang memunculkan keresahan dalam kehidupan masyarakat bahkan pencari keadilan cenderung tendensius, skeptis terhadap institusi pengadilan pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya oleh karena pengadilan tingkat pertama cenderung menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam kasus-kasus perkara tertentu terlebih lagi terhadap perkara-perkara berskala besar dan menyita perhatian publik.

Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP

yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.<sup>4</sup>

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tersebut dibidang substansi materi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan akademisi maupun praktisi.

Di samping beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas yang pada prinsip dan essensinya mempersoalkan putusan bebas (*vrijspraak*), masih banyak lagi putusan-putusan hakim Pengadilan yang memutus bebas para terdakwa di persidangan yang menarik perhatian publik dengan berbagai kritik dan ketidak setujuan akan putusan yang mengandung pembebasan tersebut.

Dari adanya putusan bebas pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana amat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi seperti ini mudah dan rawan menimbulkan ketidak percayaan terhadap dunia peradilan, khususnya hakim, yang berujung adanya luapan emosi dari pihak-pihak yang tidak puas akan putusan bebas tersebut.

Adanya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983 yang mengenyampingkan ketentuan Pasal 244 KUHAP menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut

---

<sup>4</sup>Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP* (tp, 1982), h.161.

menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir dari berbagai kalangan baik dari kalangan praktisi, tataran akademisi maupun masyarakat luas.

Dengan adanya gejala dan fakta sosio yuridis yang terjadi seperti tersebut diatas seolah-olah putusan pengadilan yang mengandung pembebasan tersebut tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana terutama esensi akan putusan bebas (*vrijspreek*) tersebut.

Berkaitan dengan masalah upaya hukum, maka undang-undang secara tegas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi. Pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan banding dan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, pada satu sisi melindungi kepentingan hukum terdakwa namun pada sisi yang lain bertentangan dengan kepentingan hukum itu sendiri. Hal tersebut dimungkinkan jika putusan bebas dijatuhkan terhadap perkara pidana menurut aturan hukum dan asas-asas hukum perkara pidana dimaksud diputus tidak berupa putusan bebas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Implementasi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana” (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks).***

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya mengenai putusan bebas yang dapat langsung dimintakan pemeriksaan kasasi kepada



Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Maksudnya bahwa setiap putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama baik putusan bebas murni atau putusan bebas tidak murni, Jaksa Penuntut Umum dapat langsung memintakan pemeriksaan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa melalui proses Banding sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar rujukan pemeriksaan upaya hukum kasasi putusan bebas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan dua masalah dalam skripsi ini yaitu :

1. Mengapa putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap upaya hukum kasasi mengenai putusan bebas Pengadilan Negeri?

### **D. Kajian Pustaka**

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dasar hukum upaya hukum kasasi pada putusan bebas dalam tindak pidana. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dasar hukum upaya hukum kasasi pada putusan bebas dalam tindak pidana, maka akan disajikan kajian pustaka yang sesuai dengan upaya hukum kasasi pada putusan bebas dalam tindak pidana.

#### **1. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Mengenai pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, Barda Nawawi Arief mengartikan:

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.<sup>5</sup>

Menurut Muladi, bahwa “Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.”<sup>6</sup>

Pengkajian secara teoritik normatif mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan pola Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) atas dasar KUHAP adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan norma hukum di bidang peradilan pidana khususnya terfokus pada upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu didukung oleh komponen sub sistem struktur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat sebagai administrator pelaksana peradilan pidana yang bernaung di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dengan masing-masing Undang-undang organiknya, meliputi: Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 48

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 1992), h. 197.

<sup>6</sup>Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama (The Habibie Center, 2002), h. 35.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berbicara mengenai institusi-institusi penegakan hukum terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana maka dalam hal ini akan terfokus hanya pada institusi Kejaksaan dan Pengadilan.

## 2. Pengertian Upaya Hukum

Mengenai pengertian upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yang menyatakan:

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.<sup>7</sup>

Undang-undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Penuntut Umum, yakni apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Terkait dengan upaya hukum tersebut maka keadilan yang *relevan* dalam hal ini yakni terwujudnya keadilan sosial yang secara *inheren* disebut dengan

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1987), h. 234.

keadilan Pancasila, yakni dengan berpijak pada keadilan distributif sebagai landasannya dengan melalui sarana keadilan korektif.

### 3. Pengertian Putusan Bebas

Berikut beberapa pengertian putusan bebas (*vrijspraak*) yang dikemukakan oleh kalangan doktrina, diantaranya:

Nikolas Simanjuntak mengemukakan Putusan Bebas (*vrijspraak*) adalah bilamana kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hal ini berarti bahwa benar ada, tetapi yang menjadi soal adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan.<sup>8</sup>

Menurut Lilik Mulyadi bahwa *Vrijspraak* adalah terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>9</sup>

Sedangkan Harun M. Husein berpendapat sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Nikolas Simanjuntak, *Acara Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 224.

<sup>9</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), h.127.

<sup>10</sup>Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 108.

#### **4. Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*) Dan Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*)**

Berdasarkan pendapat dari beberapa sarjana dan yurisprudensi, akhirnya didapat suatu kesimpulan terkait dengan pengertian dari putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*), sebagai berikut:

Bahwa dapat ditarik kriteria untuk mengidentifikasi apakah putusan bebas itu mengandung pembebasan yang murni atau tidak murni. Kriteria dimaksud, adalah:

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila: Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya.
- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.<sup>11</sup>

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, ialah :

1. Untuk mengetahui dapatkah putusan bebas dimintakan upaya hukum.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap upaya hukum kasasi mengenai putusan bebas Pengadilan Negeri.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini ialah :

- a. Bagi Mahasiswa Hukum khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

---

<sup>11</sup>Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h.130.

referensi bagi yang ingin mengetahui serta meneliti lebih jauh tentang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana.

- b. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menjalani suatu perkara yang sama mengenai Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana.
- c. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan penulis untuk memperdalam pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### **A. *Putusan Bebas dapat dimintakan Upaya Hukum***

##### **1. Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan**

##### **a. Pengertian Kasasi dan Tujuannya**

Kasasi yang berarti pembatalan adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tingkat terakhir Pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 10 (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 2 Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan peradilan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung diberi kewenangan kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan atau perbuatan pengadilan lain yang bukan Mahkamah Agung. Melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung membina kesatuan penegakan hukum diseluruh wilayah negara dan menciptakan hukum baru, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kewajiban di bidang hukum serta untuk memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.<sup>1</sup>

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis yang kata asalnya *Casser*, yang artinya memecah. Semula lembaga ini berada ditangan raja beserta dewannya yang disebut dengan *Conseil du roi*, setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis dibentuklah suatu badan yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum. Jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dengan kekuasaan kehakiman.

---

<sup>1</sup>M.H.Silaban, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana* (Jakarta: CV Sumber Ilmu Jaya, 1997), h. 6.

Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula dinegeri Belanda, yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadi kesalahan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.

Kasasi sebagai upaya hukum dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum) dan kasasi demi kepentingan hukum (yang diajukan oleh Jaksa Agung).

Kasasi biasa, diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung.

Bertitik tolak pada uraian diatas, kiranya dapat memberi gambaran kepada kita tentang tujuan dari lembaga kasasi. Pemahaman tentang maksud dan tujuan upaya hukum kasasi adalah sangat penting, oleh karena dalam upaya hukum kasasi tidak hanya terkandung maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemohon kasasi, tetapi lebih luas daripada itu.

Maksud dan tujuan kasasi erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, dalam memimpin dan mengawasi pengadilan bawahan, demin terciptanya kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dalam wilayah Negara kita.

Berkaitan dengan maksud dan tujuan upaya hukum kasasi, Andi Hamzah menyatakan :

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana diIndonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),. h. 298.



Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, maka maksud dan tujuan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :

1. Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan (pengadilan negeri/pengadilan tinggi). Dalam hal ini Mahkamah Agung, melalui koreksi atas putusan pengadilan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru, dalam hal ini dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Sebagaimana pendapat Yahya Harahap, bahwa berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk “*Judge Making Law*”, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.
3. Terciptanya keseragaman penerapan hukum, dengan tujuan ini dimaksudkan bahwa melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Dari uraian tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan upaya hukum kasasi bukan hanya untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum, koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan. Tetapi lebih dari itu, tujuan yang diinginkan adalah untuk menciptakan jaminan kepastian hukum dalam Negara hukum yang kita cintai ini.

## **b. Dasar Hukum dan Alasan Kasasi**

Di Indonesia lembaga kasasi diatur dalam pasal 244 KUHAP, yang isinya adalah sebagai berikut :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.<sup>3</sup>

Ketentuan lain yang menyangkut kasasi diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang isinya sebagai berikut :

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

Sehubungan dengan rumusan pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana tersebut diatas, Andi Hamzah menyatakan bahwa :

Dalam penjelasan dikatakan cukup jelas, dengan tidak disebutkan pengecualian kasasi dalam perkara pidana yaitu putusan bebas, maka ditarik kesimpulan bahwa dalam hal putusan bebas pun dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung.

Apabila rumusan kedua pasal undang-undang tersebut diatas diperhatikan, nampak terlihat adanya perbedaan yang mendasar. Menurut pasal 244 KUHAP maka terhadap putusan pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kecuali putusan bebas. Sedangkan menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, putusan beaspun dapat dimintakan kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung, sebagaimana pendapat Andi Hamzah.

Disamping kedua pasal dari pada undang-undang sebagaimana diuraikan diatas, dalam KUHAP juga terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang acara

---

<sup>3</sup>Fokusindo Mandiri, *KUHP dan KUHP (edisi Revisi 2010)*, h. 317.

kasasi. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut harus dipenuhi oleh para pihak (terdakwa dan penuntut umum), dalam rangka mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Oleh karena tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, mengakibatkan permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur acara kasasi adalah pasal 244, 245, 246, 247, 248, 249 dan pasal 253 KUHAP.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan kepada para pihak (terdakwa atau penuntut umum) oleh karena apabila salah satu pihak merasa tidak puas atas putusan pengadilan tersebut, menjadi alasan para pihak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Dalam KUHAP ditentukan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat 1 sebagai berikut :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248, guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagai berikut :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

---

<sup>4</sup>Fokusindo Mandiri, *KUHP dan KUHAP (edisi Revisi 2010)*, h. 321

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Alasan-alasan yang ditentukan oleh kedua pasal dalam undang-undang sebagaimana diatas, merupakan pedoman bagi pemohon kasasi dan juga bagi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan kasasi. Diluar alasan-alasan tersebut tidak ada alasan lain yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan permohonan kasasi.

#### **c. Kasasi Terhadap Putusan Bebas**

Berpedoman pada KUHAP, maka hanya dikenal bentuk putusan bebas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP, diluar ketentuan tersebut tidak dikenal dengan bentuk putusan bebas lainnya. Dalam penegasan pasal 191 ayat 1 KUHAP dihubungkan dengan pasal 1 KUHAP dihubungkan dengan pasal 244 KUHAP, maka terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

Ketentuan pasal 191 ayat 1 tersebut, erat kaitannya dengan ketentuan pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>5</sup>

Tetapi kenyataannya dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal dengan bentuk putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Karena adanya klasifikasi yang demikian, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan memakai jalur bebas tidak murni.

Tentang apa yang dimaksud dengan putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, Lilik Mulyadi menyatakan :

---

<sup>5</sup>Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, h. 109

- Pembebasan murni atau de “*zulvere vrijspraak*” di mana hakim membenarkan mengenai “*feiten*”nya (*na alle noodzakelijke voor beslissingen met juistheid te hebben genomen*).
- Pembebasan tidak murni atau de “*onzuivere vrijspraak*” dalam hal “*bedekte niegtugheid van dagvaarding*” (batalnya dakwaan secara terselubung) atau “perampasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan”.<sup>6</sup>

Pengertian lain dikemukakan oleh Ven Bemmelen yang dikutip Andi Hamzah serbagai berikut :

Bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak dari pada yang ada dan lebih banyak dari pada yang perlu di dalamnya.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan bebas tidak murni adalah putusan bebas dari segala dakwaan, sedang berdasarkan pada hasil pemeriksaan disidang pengadilan yang didasarkan pada fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ada seharusnya putusan tersebut bukan putusan pembebasan dari segala dakwaan tetapi putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Jika diuraikan mengenai putusan bebas murni dan bebas tidak murni sebagaimana di atas, dihubungkan dengan pasal 244 KUHP yang secara limitatif menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. Maka dapat dipastikan bahwa terhadap putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan terhadap putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi atas putusan bebas, pihak pemohon kasasi dalam memori kasasinya harus terlebih dahulu menguraikan dimana letak sifat tidak murninya putusan bebas yang dimaksud. Setelah itu barulah pihak pemohon kasasi sampai

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, h. 179.

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, h. 286.

pada penguraian tentang alasan-alasan kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 ayat 1 KUHAP.

Dalam uraian tersebut pemohon harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi itu sebenarnya bukanlah pembebasan yang murni. Tetapi pembebasan yang tidak murni. Yakni suatu pembebasan yang didasarkan pada suatu kekeliruan penerapan hukum. Misalnya pembebasan yang didasarkan pada kekeliruan penafsiran atau interpretasi suatu istilah yang terdapat dalam surat dakwaan, atau pembebasan tersebut sesungguhnya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum tetapi karena kekeliruan penerapan hukum, maka putusan tersebut berbunyi pembebasan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Harun M. Husein menyatakan :

Oleh karena itu, adalah kurang tepat kalau dalam hal ini pemohon hanya menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara tersebut telah terjadi kekeliruan penerapan hukum, tanpa mengemukakan uraian yang menunjukkan secara konkrit dimana terletak kekeliruan penerapan hukum itu. Menguraikan dimana terletak kekeliruan penerapan hukum itu merupakan upaya pemohon kasasi untuk menunjukkan kepada Mahkamah Agung bahwa dasar pembebasan terdakwa tersebut adalah kekeliruan penerapan hukum. Oleh karena itu pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan murni itu adalah pembebasan yang didasarkan pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.<sup>8</sup>

Penguraian secara yuridis normatif mengenai hal kekeliruan penerapan hukum dalam memori kasasi pemohon adalah sangat penting, oleh karena penguraian yang demikian akan menentukan apakah permohonan kasasi terhadap putusan bebas dari pemohon kasasi tersebut diterima atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian disimpulkan bahwa putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi adalah putusan bebas yang tidak murni. Dengan konsekuensi

---

<sup>8</sup>Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, h. 127.

bahwa pemohon kasasi dalam hal ini penuntut umum harus membuktikan bahwa putusan tersebut bukan pembebasan murni.

Menurut Lilik Mulyadi, adapun yang menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas adalah :

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 44 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 1 angka 12 dan pasal 245 ayat 3 KUHP
4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984.
5. Petunjuk Mahkamah Agung RI dan angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.<sup>9</sup>

**B. Konsekuensi Hukum terhadap Upaya Hukum Kasasi Mengenai Putusan Bebas Pengadilan Negeri**

Mengenai putusan bebas jika ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena :

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (sistem pembuktian *negatief wettelijke*) maksudnya adalah tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan Terdakwa, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana tidak bisa dijatuhkan. Untuk itu harus diputus bebas. Tentang sistem pembuktian *negatief wettelijke* diatur

---

<sup>9</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 255.

dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-sekurang dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian maksudnya adalah untuk membuktikan Terdakwa bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jika suatu perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hanya terbukti berdasarkan 1 (satu) keterangan saksi saja (*unus testis nullus testis*) maka Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Kecuali didukung oleh alat bukti sah lainnya minimal 1 alat bukti seperti keterangan terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan pidana tersebut. Akan tetapi apabila sudah ada 2 orang saksi yang menerangkan perbuatan pidana tersebut, maka alat bukti lain hanya sebagai pendukung atau petunjuk, kecuali perkara-perkara yang membutuhkan atau mewajibkan adanya alat bukti surat seperti visum et repertum. Biasanya dalam perkara penganiayaan.

Berdasarkan pasal KUHAP diatas dapat disimpulkan putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi lagi. Namun terhadap pasal 244 KUHAP diatas oleh Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tahun 1983 pada angka 19 lampiran keputusannya memberikan pedoman tentang putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi. Petunjuk pedoman itu tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 dan 244 KUHAP. Dari kedua ketentuan pasal itu ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan dalam kehidupan peradilan yaitu :

- a. Terhadap putusan bebas ”tidak dapat dimintakan banding”.



- b. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas ”dapat diminta kasasi”
- c. Hal ini akan didasarkan yurisprudensi.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah - istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan, memberikan persepsi yang sama tentang istilah yang dipakai dalam penulisan yaitu:

1. *Implementasi* menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud dengan implementasi adalah Pelaksanaan<sup>10</sup>.
2. *Upaya* menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud<sup>11</sup>.
3. *Hukum* menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud peraturan atau adat resmi yang dibuat oleh penguasa (pemerintah, Negara)<sup>12</sup>.
4. *Kasasi* menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh mahkamah agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang.<sup>13</sup>
5. *Putusan* menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud putusan adalah ketentuan atau ketetapan<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 441.

<sup>11</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1345.

<sup>12</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 426.

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 526.

<sup>14</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 930.

6. *Bebas* menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud bebas adalah lepas sama sekali (tidak terlarang, terganggu, dan sebagainya boleh bergerak, bercakap, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa).<sup>15</sup>
7. *Tindak* menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud tindak adalah perbuatan.<sup>16</sup>
8. *Pidana* menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud pidana adalah kejahatan atau kriminal.<sup>17</sup>

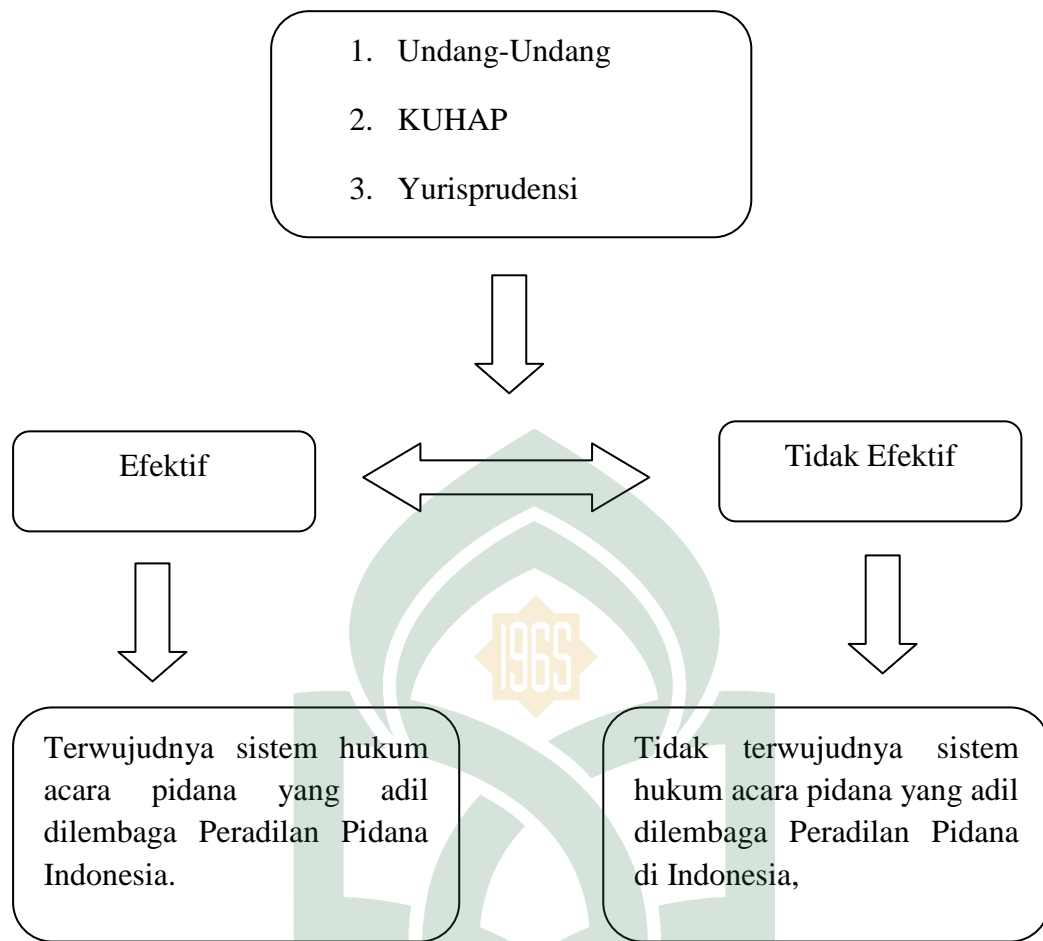


---

<sup>15</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 114.

<sup>16</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1276.

<sup>17</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 889



Berdasarkan fokus penelitian dan kerangka konseptual diatas, maka penyusun akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul yang penyusun angkat. Adapun teori-teori tersebut yaitu

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Pidana dan Tindak Pidana**

###### **a. Pidana**

Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana. Oleh Simons, pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*).<sup>18</sup> Ini karena hukuman pidana merupakan hukuman yang umumnya dianggap sebagai hukuman yang

---

<sup>18</sup>D.Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel* (Vierde druk. P. Noordhoff: Groningen, 1921), h. 1.

lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam bidang hukum perdata dan hukuman dalam bidang administrasi Negara.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian dan makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para Sarjana sebagai berikut:

Menurut Sudarto<sup>19</sup>, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan berbagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Lebih lanjut, Roeslan Saleh<sup>20</sup> mengemukakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat delik.

Definisi lainnya tentang hukum pidana material dikemukakan oleh W.P.J Pompe bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perilaku-perilaku apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan.<sup>21</sup>

Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat efek jera tetapi juga diitujukan untuk membuat pelanggar

---

<sup>19</sup>Ninie Suparni, dkk, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU no. 31 Tahun 1999 Jo. UU no. 20 tahun 2001* (Jakarta : LIPI Press, 2008), h. 11.

<sup>20</sup>Ninie Suparni, dkk, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU no. 31 Tahun 1999 Jo. UU no. 20 tahun 2001* (Jakarta : LIPI Press, 2008), h.. 12

<sup>21</sup>W.P.J. Pompe, *Handboek van het Nederlandse Straffeucht* (Tjeenk Willink:vijfde herziene dru Zwolle, 1959), h.2.

dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Pidana dalam hukum pidana hanyalah merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang adil, aman dan tentram.

## **b. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam bahasa Belanda, yakni *strafbaar feit*. Hingga kini belum ada terjemahan resmi dari pemerintah Indonesia terhadap istilah tersebut sehingga antara satu ahli hukum dengan ahli hukum yang lain menggunakan terjemahan yang berbeda terhadap apa yang dimaksud *strafbaar feit* tersebut. Ada pakar hukum yang menggunakan istilah Tindak Pidana seperti Wirjono Prodjodikoro yang juga digunakan di hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita, ada yang menggunakan istilah “Peristiwa Pidana” yang digunakan oleh A. Zainal Abidin Farid, serta istilah “Delik” sebagaimana yang biasa dipakai oleh Utrecht. Untuk menjelaskan pengertian dari *strafbaar feit* itu sendiri, berikut akan penulis kemukakan beberapa definisi dan penjelasan beberapa pakar hukum mengenai *strafbaar feit*.

Menurut Simons<sup>22</sup>, seorang guru besar hukum pidana pada Universitas Utrecht, *strafbaar feit* yang ia terjemahkan sebagai peristiwa pidana adalah:

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kesalahan yang dimaksud Simons mencakup kesalahan dalam arti yang luas, yakni *dolus* dan *culpa*. Simons membagi unsur *strafbaar feit* menjadi dua bagian. Pertama, unsur objektif yang meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu tertentu; dan unsur

---

<sup>22</sup>S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Ahaem-Petehaem, 1996), h. 201.

subyektif yang meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak.

Van Hamel, guru besar hukum pidana pada Universitas Kerajaan di Leiden, menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit* sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat apabila istilah yang digunakan yaitu *strafwaardig feit*, yang beliau jelaskan sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Vos memberikan definisi *strafbaar feit* yang lebih singkat, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Menurut Pompe<sup>23</sup>, ada dua macam definisi mengenai *strafbaar feit*, yakni yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Secara teoritis, *strafbaar feit* (peristiwa pidana) adalah:

Pelanggaran *norm* (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Sedangkan secara perundang-undangan, *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung handling (perbuatan) dan nalaten (pengabaian; tidak berbuat; berbuat pasif), biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa.

Hazewinkel-Suringa<sup>24</sup> menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan

---

<sup>23</sup>Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 225.

<sup>24</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Cet. III (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 181.

oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Utrecht<sup>25</sup>, istilah peristiwa pidana lebih tepat digunakan karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa Pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijkheid*" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja.

Jadi, berdasarkan penjelasan-penjelasan para pakar hukum di atas kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang yang melakukannya dapat dijatuhkan pidana.

---

<sup>25</sup>Utrecht, *Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), h. 251.

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terhadap unsur-unsur tindak pidana, ada ahli yang berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku/pembuat pidana) dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan dan adapula yang merasa perlu untuk dipisahkan. Golongan yang merasa tidak perlu dipisahkan disebut aliran monisme, sedangkan yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut aliran dualisme. Berikut uraian singkat mengenai kedua aliran tersebut.

#### 1. Aliran Monisme

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monisme dan dualisme tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (*plegen*) dan kepembuatan (*daderschap*), dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan.

Aliran Monisme ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simon, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monisme memberikan definisi *strafbaar feit* yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme.

*Strafbaar feit* yang didefinisikan Pompe<sup>26</sup> sebagai “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua unsur dalam *strafbaar feit*. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan

---

<sup>26</sup>Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 49.



atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh UU. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang<sup>27</sup> menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dan unsur obyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum;

---

<sup>27</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Cet. III (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 193-194.

- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid<sup>28</sup> menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana. Sedangkan J. Von Kries dengan teori *adaequat* sebab (*causa*) adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, dimana perbuatan yang seimbang dengan akibat adalah perbuatan yang akibatnya sudah diketahui sebelumnya oleh pembuatnya.<sup>29</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers<sup>30</sup> sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang *strafbaar feit* (peristiwa pidana) sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan.<sup>31</sup> Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur delik adalah:

---

<sup>28</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), h. 73.

<sup>29</sup>H.L.A. Hart dan Tony Honore, *Causation in the law* (New York: Oxford University Press, 1985), h. 438.

<sup>30</sup>JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: PT Bina Aksar, 1987), h. 135.

<sup>31</sup>JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, h. 136.

1. Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana, yaitu:
  - a. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan culpa.
  - b. Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).
2. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu:
  - a. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang.
  - b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (tidak ada alasan pembeda).

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran *finale handlungslehre* menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.<sup>32</sup> Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama *finale handlungslehre*, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif). Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistik yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku.

Tujuan utama *finale handlungslehre* adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas

---

<sup>32</sup>Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 13.

tujuan, kehendak yang mengendalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu "rugggeraat" dari suatu perbuatan final.<sup>33</sup>

## 2. Aliran Dualisme

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno<sup>34</sup>, "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Dalam konteks pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan terjadi apabila perbuatan tersebut dirangkum dalam UU dan tidak dibenarkan oleh alasan pembenar. Atas dasar itu, unsur batin harus dilepaskan dari perbuatan pidana. Kantorowicz menyatakan, sebagaimana dikutip A. Zainal Abidin Farid, bahwa perbuatan pidana (*staffbare handlung*) mensyaratkan adanya perbuatan, persesuaian dengan rumusan UU dan tidak

---

<sup>33</sup>Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 18-20.

<sup>34</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* Cet. V (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 54.

adanya alasan pembeda. Sedangkan bagi pembuat disyaratkan adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf.<sup>35</sup>

Pandangan ini juga diperkuat dalam Pasal 350 *Wetboek van Strafvordering Nederland* yang memerintahkan hakim yang memeriksa perkara dipersidangan agar mempertimbangkan dahulu apakah terdakwa terbukti mewujudkan *strafbaarfeit*, kalau sudah terbukti barulah hakim mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah (*strafbaarheid*), kalau terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, barulah hakim mempertimbangkan tentang pidana atau tindakan yang dijatuhkan.<sup>36</sup> Dari sini nampaknya pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memudahkan hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Konsep gradualitas berjenjang yang diamanatkan Pasal 350 untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara tidak terlepas dari konsep dualisme yang mengadakan diferensiasi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, ajaran dualisme tidak hanya berlaku di ranah hukum pidana materiel saja melainkan juga berlaku dalam hukum acara pidana terutama bagi hakim yang memeriksa perkara.

#### **a. Putusan Pengadilan**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) dimana dalam putusan itu hakim menyatakan tentang apa yang telah dipertimbangkan dari putusannya.

Oleh karena putusan pengadilan (hakim) merupakan akhir dari suatu proses peradilan, maka sudah sepantasnya jika putusan hakim itu mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, baik kepada terdakwa, terpidana, penuntut umum maupun bagi masyarakat yang sangat mendambakan keadilan.

---

<sup>35</sup>Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 44-45.

<sup>36</sup>Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, h. 43.

Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas dan jelas memberikan definisi sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 11 sebagai berikut :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>37</sup>

Dari definisi putusan pengadilan sebagaimana rumusan pasal 1 ayat 11 KUHP kiranya dapat member gambaran bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang harus dinyatakan dalam sidang pengadilan yang terbuka. Isi dan sifat dari putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Disamping itu putusan pengadilan harus diambil menurut tata cara yang telah ditentukan.

Suatu putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka oleh karena putusan yang diucapkan pada sidang pengadilan yang tidak terbuka untuk umum, maka putusan tersebut batal demi hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 195 KUHP yaitu :

Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>38</sup>

Sedangkan menyangkut tata cara pengambilan putusan pengadilan terdapat beberapa pasal dalam KUHP, yang secara tegas mengaturnya. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan dimaksud maka putusan pengadilan batal demi hukum.

---

<sup>37</sup> Muhamad Gerry Rizki, *KUHP dan KUHP* (Permata Press : 2008), h. 194.

<sup>38</sup> Muhamad Gerry Rizki, *KUHP dan KUHP* (Permata Press : 2008), h. 273.

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa isi dari pada putusan pengadilan seharusnya mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, yang ada dalam hal ini terdakwa, terpidana, penuntut umum dan juga bagi masyarakat. Ketidak puasan terhadap putusan pengadilan merupakan alasan bagi para pihak (terdakwa, terpidana dan penuntut umum) untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang dinilainya belum sesuai dengan apa yang seharusnya, keberatan tersebut diajukan melalui jalur upaya hukum.

Mengenai apa yang dimaksud dengan upaya hukum diatur dalam pasal 1 ayat 12 KUHP yang lengkapnya :

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>39</sup>

Dari rumusan tersebut diatas disimpulkan bahwa upaya hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum terdakwa atau terpidana dan juga untuk melindungi kepentingan dari pada hukum itu sendiri.

Dari sudut kepentingan hukum terdakwa, berarti terdakwa berhak untuk tidak menerima putusan pengadilan karena menurut kenyataan dan menurut aturan hukum yang berlaku terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana isi putusan pengadilan. Sedangkan dari sudut kepentingan hukum itu sendiri, maka upaya hukum dimaksudkan untuk melindungi pelaksanaan dari aturan hukum itu sendiri, dalam arti apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Meskipun undang-undang membuka kemungkinan penggunaan hak dari terdakwa, terpidana atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan melalui jalur upaya hukum, tidak berarti bahwa terhadap setiap

---

<sup>39</sup>Muhamad Gerry Rizki, *KUHP dan KUHP* (Permata Press : 2008), h. 194.

putusan pengadilan para pihak yang berkepentingan dapat menggunakan haknya tersebut. Yang berarti pula hanya terhadap hal-hal yang sesuai sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang dapat dimintakan upaya hukum, serta menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

## **b. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan**

### **1) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)**

Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan pemidanaan secara tersirat dapat ditemukan dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP yang bunyinya:

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa :

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan kepadanya terbukti dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dihukum.<sup>41</sup>

Selanjutnya menurut Yahya Harahap menyatakan mengenai putusan pemidanaan ialah :

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai putusan pemidanaan yang dikemukakan oleh para pakar tersebut diatas, dan sebagaimana telah ditentukan

---

<sup>40</sup>Muhamad Gerry Rizki, *KUHP dan KUHAP* (Permata Press: 2008), h. 272.

<sup>41</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Praktek Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.286.

<sup>42</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 333.



dalam pasal 193 KUHAP kiranya dapat memberi gambaran tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim.

Berkaitan dengan masalah kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim, maka pasal 183 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>43</sup>

Hal ini juga telah dijelaskan dalam QS An Nisa/4: 58 mengenai seorang hakim dalam menetapkan hukum atau mengambil keputusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT, Allah berfirman dalam QS An Nisa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا... ﴾ (58)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha pendengar lagi maha melihat.<sup>44</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim harus berpedoman pada minimal dua alat bukti yang sah. Dan berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Setelah hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, harus pula dipertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan terdakwa itu sendiri dapat dihukum atau tidak.

<sup>43</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, h. 268.

<sup>44</sup>Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (QS.An Nisa/4:58)

Hal ini berarti bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim bukan hanya didasarkan pada terbukti tidaknya kesalahan terdakwa, akan tetapi juga harus didasarkan pada pertimbangan apakah memang terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak.

Pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwa seorang tidak dapat dipidana oleh karena keadaan-keadaan yang tertentu pula, yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah-istilah dasar-dasar peniadaan pidana.

Berkaitan dengan dasar peniadaan pidana Andi Zainal Abidin Farid menyatakan :

Dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitings gronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*). Yang berkaitan dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak jatuh pidana<sup>45</sup> . . .

Salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan dasar peniadaan pidana adalah pasal 44, yang menyatakan bahwa :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit, tidak dipidana.<sup>46</sup>

Sehingga walaupun kesalahan yang didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi terhadap diri terdakwa berlaku dasar-dasar peniadaan pidana maka terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana.

---

<sup>45</sup>Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 401.

<sup>46</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Praktek Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 27.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim, jika ia berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap diri terdakwa tidak berlaku dasar-dasar peniadaan pidana.

## **2) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)**

Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan bebas secara tersirat dapat ditemukan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP, yang juga merupakan dasar hukum penjatuhan putusan bebas. Yaitu sebagai berikut :

Jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.<sup>47</sup>

Atas rumusan pasal 191 ayat 1 KUHAP tersebut, Andi Hamzah ( 2011 : 287 ) menyatakan :

Kurang tepat dipakai kata “kesalahan” disitu karena jika kesalahan tidak terbukti maka putusannya mesti lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat dipakai kata “perbuatan” disitu, sehingga berbunyi “. . . perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa<sup>48</sup> . . .”

Sedangkan menurut Leden Marpaung, dengan memperhatikan penjelasan resmi pasal tersebut, maka kekeliruan penafsiran dapat dicegah karena penjelasan tersebut berbunyi :

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut

---

<sup>47</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana diIndonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 287.

<sup>48</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana diIndonesia (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h.287.

penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana.<sup>49</sup>

Pengertian yang hampir sama diberikan Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa :

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.l mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukan.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan putusan bebas yang ada dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Vrijspraak* adalah :

Apabila terdakwa dijatuhi putusan bebas *Vrijspraak*, terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>51</sup>

Lain halnya dengan Yahya Harahap untuk memahami apa yang dimaksud dengan putusan bebas, terlebih dahulu harus dijawab “dalam keadaan yang bagaimana seorang terdakwa diputus bebas”.<sup>52</sup>

Bila uraian tersebut dikaji, maka akan dapat diperoleh gambaran mengenai dasar pemikiran, pertimbangan maupun pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pembahasan mengenai putusan bebas tidak terlepas dari substansi materi pembahasan tentang pembuktian unsur-unsur delik dan juga teori ilmu hukum.

---

<sup>49</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 137.

<sup>50</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, h.. 287.

<sup>51</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 151-152.

<sup>52</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 864.

Kerangka berfikir diatas dimaksudkan untuk mengetahui apakah pembuktiaan dalam pemeriksaan disidang pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian.

Terkait dengan masalah pembuktian, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dengan 4 teori pembuktian, yaitu :

- Teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ( *positif wetelijke bewijstheorie* ). Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang.<sup>53</sup> Hal ini berarti jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Terhadap teori ini D. Simons yang dikutip Andi Hamzah menyatakan :

Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positif wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>54</sup>

Teori ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro yang dikutip Andi Hamzah dengan alasan :

Bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinan tentang hal kebenaran itu.<sup>55</sup>

- Teori Pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (conviction intime theorie). Menurut teori ini didasari atas pemikiran bahwa pengakuan terdakwa pun tidak selalu membuktikan kebenaran, sehingga dengan keyakinan hakim berdasar pada keyakinan hati nuraninya sendiri

---

<sup>53</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 119.

<sup>54</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h. 251.

<sup>55</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, h. 251.

ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.<sup>56</sup>

Menurut Andi Hamzah teori memiliki kelemahan yaitu :

Sistem ini memberi kebebasan hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi disamping itu dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.<sup>57</sup>

Kedua teori pembuktian yang diuraikan dimuka mengandung kelemahan-kelemahan yang prinsipil, teori yang satu membatasi kebebasan hakim dalam melakukan pembuktian. Sedangkan teori yang lain member kebebasan kepada hakim yang terlalu besar. Karena kelemahan-kelemahan tersebut maka sebagai jalan tengah muncul teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

- Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutus seorang yang bersalah berdasar atas keyakinannya, keyakinan mana disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis terpecah menjadi dua yaitu : teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonne theory*) dan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*).

---

<sup>56</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana diIndonesia, h. 252.

<sup>57</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana diIndonesia, h .253.

Kedua teori ini mempunyai persamaan yakni berdasar keyakinan hakim dengan konsekuensi bahwa terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Adapun perbedaan antara kedua teori ini terletak pada pangkal tolaknya. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis bertitik tolak pada keyakinan hakim dengan mengesampingkan undang-undang, sedangkan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif berpangkal tolak pada ketentuan undang-undang, sehingga keyakinan hakim juga harus didasari pada ketentuan undang-undang.

Jika teori-teori tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 183 KUHP yang merupakan salah satu dasar penjatuhan putusan bagi hakim, yang lengkapnya :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>58</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa KUHP menganut teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Hal ini berarti pula bahwa hakim dalam melakukan pembuktian pada pemeriksaan disidang pengadilan terikat pada peraturan-peraturan pembuktian yang ditentukan, disamping itu harus didukung dengan kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sebagaimana penegasan dalam pasal 191 ayat 1 KUHP bahwa untuk dapat dijatuhkan putusan bebas kepada terdakwa maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa terdakwa tidak bersalah atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan penegasan tersebut diatas mengandung konsekuensi yuridis bahwa kesalahan dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti maka terdakwa diputus bebas.

---

<sup>58</sup>Fokusindo Mandiri, *KUHP dan KUHP (edisi Revisi 2010)*, h. 292.

Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa yang seharusnya dinyatakan diputus bebas oleh hakim, ialah terdakwa yang :

1. Sama sekali tidak terbukti mewujudkan delik sesuai rumusan undang-undang pidana; melakukan perbuatan yang bukan perbuatan pidana.
2. Yang tidak terbukti mewujudkan salah satu unsur perbuatan yang melawan hukum dirumuskan oleh undang-undang.<sup>59</sup>

Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

- Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktiaan menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut; dan
- Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang diterapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>60</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan penjatuhan putusan bebas oleh hukum didasari atas pertimbangan dan pendapat serta keyakinan hukum, bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ataupun terhadap perbuatan dan diri terdakwa berlaku dasar-dasar peniadaan pidana.

---

<sup>59</sup>Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.157.

<sup>60</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya* (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 323.



### 3) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan mengenai dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP, yaitu :

Jika berpendapat bahwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>61</sup>

Atas ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHAP tersebut Yahya Harahap menyatakan :

Kiranya putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa, memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana

Mengacu pada pendapat Yahya Harahap tersebut diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Yang berarti perbuatan yang didakwakan dan telah tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum adat, ataupun terhadap perbuatan yang didakwakan tersebut berlaku dasar-dasar peniadaan pidana.

Sebagai contoh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/Pid/1988/PT NTB pada tanggal 30 Juni 1988, yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana. Putusan yang demikian diambil dari Mahkamah Agung berdasarkan alasan, bahwa oleh karena tidak adanya “unsur melawan

---

<sup>61</sup>Fokusindo Mandiri, *KUHP dan KUHAP (edisi Revisi 2010)*, h. 295.

hukum dalam perbuatan terdakwa”, maka meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>62</sup>

Pada bagian lain Yahya Harahap menyatakan untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan penganlepasan dari segala tuntutan hukum ada baiknya bentuk putusan ini kita perbandingan dengan putusan pembebasan, perbandingan mana dapat kita tinjau dari beberapa segi antara lain :

- Dari segi pembuktian  
Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimal pembuktian yang dengan putusan penganlepasan dari segala tuntutan hukum apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah dan meyakinkan baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maupun dari segi batas minimal pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti tadi, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum dagang atau hukum adat.
- Dari segi penuntutan  
Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa disidang pengadilan, Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup membuktikan keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu kesalahan terdakwa tidak terbukti, karena kesalahannya tidak terbukti, terdakwa “diputus bebas” dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang didakwakan kepadanya. Sedang pada putusan penganlepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakekatnya apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihat sebagai perbuatan tindak pidana.<sup>63</sup>

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan pengadilan (hakim) bilamana pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan telah

---

<sup>62</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya* (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 193.

<sup>63</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, h.188-189

terbukti bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena perbuatan yang didakwakan tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum adat maupun hukum dagang. Ataupun terhadap perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut berlaku dasar-dasar peniadaan pidana.

Sebagaimana pandangan aliran dualistis yang dalam merumuskan unsur-unsur delik memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat. Yang apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka syarat penjatuhan pidana juga terpenuhi. Sedangkan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa harus diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, yang dalam hal ini putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan pengadilan bilamana salah satu unsur dari unsur pembuat tidak terpenuhi yakni tidak ada alasan pemaaf.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Dalam penelitian ini menggunakan jenis *field research kualitatif*, sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar dalam hal ini Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang pada awalnya berfungsi sebagai tempat penghukuman bagi rakyat pribumi, Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di Makassar dan sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung pengadilan Negeri Makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena itulah gedung Pengadilan Negeri Makassar yang masih khas dengan corak Belanda tersebut termasuk diantara situs-situs bersejarah yang ada di Kota Makassar.

Kejaksaan Negeri Makassar berkedudukan di ibukota Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Makassar. Kejaksaan Negeri Makassar memiliki tugas melakukan penuntutan, menjalankan penetapan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat. Selain itu Kejaksaan Negeri Makassar juga menyelenggarakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan instansi yang berkompeten dan berwenang untuk melaksanakan upaya hukum

kasasi terhadap putusan bebas dalam tindak pidana yang dijatuhkan dalam pengadilan negeri.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociologys Legal Research*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Upaya Hukum Kasasi Pada Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana. Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah hakim yang berkompeten pada Pengadilan Negeri Makassar dan Jaksa yang berkompeten pada Kejaksaan Negeri Makassar.
- b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan alat rekam suara selama wawancara dengan hakim maupun jaksa sebagai pihak yang terkait mengenai judul yang penulis angkat dalam skripsi ini.

#### ***F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data***

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif mengenai implementasi upaya hukum kasasi pada putusan bebas dalam tindak pidana.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk melengkapi hasil penelitian skripsi ini, maka dalam bab ini penyusun menyajikan data yang diperoleh selama proses penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar berhubungan dengan judul skripsi yang diajukan adalah “*Implementasi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana*” (*Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:576/PID.B/2010/PN.Makassar*). Data yang disajikan dalam bab ini membahas kepada permasalahan kemudian dianalisa, dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang ini.

#### **A. Pelaksanaan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Secara teori terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak tersedia kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, yang dikonsepsi dalam rumusan pasal 244 KUHP yaitu “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan redaksi pasal 244 KUHP tersebut bahwa pembentuk undang-undang (pembentuk KUHP) sebagai pemegang kebijakan yang memformulasikan ide-ide menyangkut esensi upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut secara konseptual teoritis tampak dengan tegas tidak memperkenankan jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Beberapa kalangan doktrina memandang dengan versi dan argumen senada dengan pembentuk undang-undang yang memformulasikan rumusan Pasal 244 KUHAP tersebut dengan inti esensi bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimohonkan upaya hukum lagi oleh jaksa penuntut umum baik berupa banding maupun kasasi.

Konstruksi pemikiran teori konseptual para pakar ilmu hukum masing-masing memberikan justifikasi argumennya tentang *ratio legis* atau ide dasar terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang tidak dapat dimintakan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno yang dimuat dalam bukunya Harun M. Husein mengatakan “oleh memori *van toelichting* bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat.”<sup>1</sup>

Senada dengan pendapat Ven Bemmelen yakni Soedirjo yang dikutip oleh Harun M. Husein mengatakan bahwa “Putusan bebas pintu jalan hukum tertutup.”<sup>2</sup>

Oemar Seno Adji (mantan Ketua Mahkamah Agung), sehubungan dengan putusan bebas menyatakan :

Bagi seorang terdakwa putusan bebas, yang tidak dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan terhadapnya lebih merupakan faktor utama, maka putusan bebas sebagai suatu hak yang diperoleh dan menghilangkan perbuatan pidana yang dituduhkan seyogianya tidak dijadikan dasar mengajukan permintaan kasasi seperti dinyatakan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP (Pasal 244 jo 67 KUHAP).<sup>3</sup>

Demikian beberapa pandangan kalangan doktrina yang pada intinya memberikan konsepsi pemikiran tentang pemberian putusan bebas kepada

---

<sup>1</sup>Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, h.117.

<sup>2</sup>Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, h.117.

<sup>3</sup>Agus Santoso, *Mengapa Putusan Bebas Tidak Boleh di Kasasi*



terdakwa yang dianggapnya sebagai hak yang prinsip, tidak dapat diganggu gugat lagi. Dapat dipahami bahwa putusan bebas yang diperoleh terdakwa merupakan hak yang mutlak. Jadi dalam konteks ini adalah berbicara mengenai “kebebasan” yang merupakan hak asasi kodrati manusia yang diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis dalam lingkup hukum pidana (hukum acara pidana) adalah bebas dari hukuman oleh hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa apabila kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengenai benar atau tidaknya hak tersebut, apakah sudah diperoleh dengan proses yang benar atau tidak, secara teori konseptual (ketentuan dalam KUHAP) jaksa penuntut umum sudah tidak diberikan kemungkinan untuk melakukan upaya kontrol atau koreksi baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi.

Sesuai yurisprudensi sebagai sumber hukum pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijsppraak*) fungsi dan tugas jaksa penuntut umum dalam memperjuangkan keadilan yang diimplementasikan dengan melakukan kontrol horizontal terhadap putusan pengadilan (*vonis*) yang mengandung pembebasan (*vrijsppraak*) selama ini dalam sistem peradilan pidana atas landasan KUHAP belum ada dasar pengaturannya.

Kondisi seperti ini berimplikasi terdapatnya suatu kesenjangan norma berupa adanya kekosongan norma (*vacuum of norm/leemeten van normen*), kekaburan norma atau norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van normen*) dalam khasanah substantial Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Langkah awal yang dapat dipandang sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) dalam bidang hukum acara pidana yang pada tataran sepintas merupakan upaya penyelamat untuk menjawab atau mengatasi adanya kesenjangan norma berupa adanya kekosongan

norma dan norma yang tidak jelas terkait upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas, dalam hal ini kebijakan tersebut dimotori oleh pihak eksekutif kala itu yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”<sup>4</sup>

Putusan hakim Mahkamah Agung yang dapat menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan adalah putusan Mahkamah Agung Regno:275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut diatas menjadi acuan dan dasar pembeda secara yuridis normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang ditingkat pemeriksaan pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam hal ini peran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum.

---

<sup>4</sup>Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. 1982.

Menurut Pudjo Hunggul H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, beliau menjelaskan bahwa

Mengenai putusan bebas pada prinsipnya putusan bebas murni maupun putusan bebas tidak murni, sudah tidak ada perbedaan lagi. Maksudnya setelah dinyatakan terdakwa tidak terbukti atau tidak bersalah maka terdakwa dinyatakan bebas. Oleh karena itu, berdasarkan perintah undang-undang maka dapat langsung dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung tidak lagi melalui upaya hukum banding.<sup>5</sup>

Sedangkan penulis sependapat dengan pernyataan Pudjo Hunggul H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa terhadap putusan bebas baik putusan bebas murni maupun putusan bebas tidak murni dapat langsung dimintakan upaya hukum kasasi. Karena disebabkan situasi dan kondisi sekarang di Negara ini maraknya tindak pidana korupsi, serta demi kepentingan hukum, keadilan dan kebenaran yang ingin dicapai.

Dalam wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar yakni Andi Armasari, beliau menyatakan

Terhadap putusan bebas berdasarkan perintah undang-undang maka dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan di Pengadilan Negeri yang disertai memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.<sup>6</sup>

Dengan demikian telah jelas alasannya untuk dapat mengajukan kasasi sebagaimana diisyaratkan pasal 244 KUHP telah terpenuhi yakni terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain

---

<sup>5</sup>Pudjo Hunggul H, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Sul-Sel, wawancara oleh penyusun di Makassar, 18 Desember 2013.

<sup>6</sup>Andi Armasari, Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar, Sul-Sel, wawancara oleh penyusun di Makassar, 11 Desember 2013.

selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas.

**1. Putusan Bebas Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 576/ Pid.B/ 2010/ PN.Makassar**

**a. Dakwaan Penuntut Umum**

**Primair**

Bahwa terdakwa Drs. M. Sidik Salam bersama-sama dengan Drs. H. Abdul Hamid Rahim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2005 sekitar pukul 11.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Ruang Kerja Asisten I Kantor Pemerintah Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari upaya Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas, serta memupuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya, maka oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, diperlukan suatu wadah dalam bentuk Celebes Convention Centre (CCC) yang representative untuk kegiatan pusat promosi Usaha Kecil Menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar dan event-event Nasional maupun Internasional, dengan pengadaan lahan seluas 6 Ha yang bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar

enam ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan.

Menindaklanjuti Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan gedung Celebes Convention Center tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan meminta bantuan kepada Walikota Makassar melalui Surat Nomor : 593/1007/Ek.bang tanggal 17 Maret 2005 perihal untuk dapat kiranya memproses pengalihan lahan yang digarap oleh keluarga RAHIM SESE untuk lokasi pembangunan gedung Celebes Convention Centre, yang ditindaklanjuti oleh terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pengguna Anggaran APBD tahun 2005 atau sebagai Instansi Pemerintah yang memerlukan lahan dengan surat Nomor 354/PDN/IV/2005/Indag tanggal 1 April 2005 perihal permohonan Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Celebes Convention Center. Bahwa atas surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Terdakwa Drs.M.SIDIK SALAM maka Walikota Makassar menetapkan lokasi peruntukkan lahan pebangunan Gedung Celebes Convention Center seluas 6 Hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga sesuai Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 289/Kep/664/2005 tanggal 6 April 2005 ;

Bahwa pada tanggal 11 April 2005 Panitia Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Makassar, melakukan penelitian mengenai status hokum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan serta dokumen-dokumen pendukungnya serta mengadakan musyawarah bertempat di Kantor BPN Kota Makassar yang dihadiri Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM sebagai Instansi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang memerlukan lahan dan dihadiri pula oleh saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan, dimana dalam musyawarah

tersebut saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM mengaku sebagai penggarap lahan dengan menunjukkan bukti-bukti surat berupa Surat P2 Nomor : 419/P II/1974, Surat SPPT NOP.106 Tahun 2005 dan Surat SPPT NOP. 216 tahun 2005. Selanjutnya Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM menyampaikan bahwa dalam rangka Pembangunan gedung Celebes Convention Center diperlukan lahan seluas 6 hektar yang dibiayai oleh APBD tahun 2005 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan proyek ini harus segera direalisasikan karena jika tidak segera direalisasikan maka proyek ini akan dialihkan ke Jawa Timur, selanjutnya terjadilah tawar menawar antara saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan dengan terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM dimana dalam musyawarah tersebut saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan awalnya meminta harga Rp. 120.000/m<sup>2</sup> (seratus dua puluh ribu rupiah permeter bujur sangkar) kemudian oleh terdakwa diminta turun menjadi Rp. 55.000/m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu rupiah permeter bujur sangkar) dan atas saran dari panitia pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah kota Makassar dengan alasan mengingat perkembangan pembangunan Kota Makassar kedepan, akhirnya Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM sepakat dengan saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap Rp. 57.500/m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah permeter bujur sangkar) yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Uang Santunan atas Lahan yang akan dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan gedung pusat Promosi Dagang dan Industri (Celebes Convention Center) seluas 6 Ha terletak di jalan H. M. DG. PATOMPO (d/h. Jalan Metro Tanjung Bunga) Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso Kota Makassar ;

Bahwa pada tanggal 21 juli 2005 bertempat di Ruang Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM melakukan penyerahan uang santunan kepada saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai sesuai dengan Berita Acara Pengadaan Tanah/Penyerahan Santunan Nomor 419/P II/1974, surat SPPT NOP 106 tahun 2005 dengan surat SPPT NOP 216 tahun 2005 kepada Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Makassar ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM yang telah melakukan tawar-menawar harga tanah untuk kepentingan Pembangunan Celebes Convention Center di Jalan Metro Tanjung Bunga dengan saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan, tanpa melakukan penelitian tentang kebenaran status hak atas tanah yang akan dilepaskan, dan menyetujui tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 57.500/m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah permeter bujur sangkar) kemudian membayar sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai penyerahan santunan kepada saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan, seharusnya tidak perlu dilakukan oleh terdakwa karena tanah di Jalan Metro Tanjung Bunga tersebut diketahui oleh terdakwa bukan tanah milik akan tetapi tanah tersebut adalah tanah tumbuh akibat pendangkalan laut yang diakui digarap oleh saksi Drs H. ABDUL HAMID RAHIM sesuai Surat P2 No. 419/P II/1974, Surat SPPT NOP 106 tahun 2005 dengan Surat SPPT NOP 216 tahun 2005. Perbuatan Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM tersebut adalah perbuatan melawan hukum bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
2. Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang ;
  - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Keppres 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dicabut dan diganti dengan peraturan Presiden RI Nomor : 36 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 1 tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor : 55 tahun 1993, yang menyatakan :



Pasal 20 :

Kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak tersebut dibawah ini diberikan uang santunan :

- a. Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960;
- b. Mereka yang memakai tanah hak barat dimaksud pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979;
- c. Bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 17 angak 3 huruf b;

Besarnya uang santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya;

Pasal 21 :

1. Bagi yang memakai tanah selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, diselesaikan menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960;
2. Dalam menyelesaikan pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia dapat menetapkan pemberian uang santunan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya supaya memerintahkan yang memakai tanah mengosongkan tanah yang bersangkutan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM bersama-sama dengan saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagaimana diuraikan diatas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM atau orang lain dan akibatnya menimbulkan kerugian Negara atau Perekonomian Negara C.q

Pemerintah Propinsi Sul-Sel sebesar Rp. 3.277.500.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak biaya perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 172.500.000 (5% x Rp. 3.450.000.000,-) sesuai hasil audit investigasi badan pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-0030/PW.21/5/2007 tanggal 4 Januari 2007 karena tidak didasari bukti Hak Garap yang sah;

Perbuatan Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM yang waktu itu menduduki jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 949/XII/Tahun 2004 tanggal 31 Desember 2004 bersama-sama dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2005 sekitar pukul 11.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Ruang Kerja Asisten I Kantor Pemerintah Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai pengguna anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 949/XII/tahun 2004 tanggal 31 Desember 2004, dimana terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM sebagai pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM mempunyai hak dan wewenang :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
2. Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang;
  - a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud;

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas, serta memupuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya, maka oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya, maka oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan suatu wadah dalam bentuk Celebes Convention Centre (CCC) yang representative untuk kegiatan pusat promosi Usaha Kecil Menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar dan event-event Nasional maupun Internasional, dengan pengadaan lahan seluas 6 Ha yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan;

Menindak lanjuti pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan gedung Celebes Convention Centre tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan meminta bantuan kepada Walikota Makassar melalui Surat Nomor : 593/1007/Ek.bang tanggal 17 Maret 2005 perihal untuk dapat kiranya memproses pengalihan lahan yang digarap oleh keluarga RAHIM SESE untuk lokasi pembangunan gedung Celebes Convention Centre, yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa Drs.M. SIDIK SALAM yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengguna Anggaran APBD tahun 2005 atau sebagai Instansi Pemerintah yang memerlukan lahan dengan surat Nomor : 354/PDN/IV/2005/Indag tanggal 1 April 2005 perihal permohonan Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Celebes Convention Centre.

Bahwa atas surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Terdakwa Drs.M. SIDIK SALAM maka Walikota Makassar menetapkan lokasi peruntukkan lahan Pembangunan Gedung Celebes Convention Centre seluas 6 Ha di Jalan Metro Tanjung Bunga sesuai surat keputusan Walikota Makassar Nomor: 289/Kep/664:/2005 tanggal 6 April 2005;

Bahwa pada tanggal 11 April 2005 Panitia Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam Wilayah Kota Makassar, melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan serta dokumen-dokumen pendukungnya serta mengadakan musyawarah bertempat di Kantor BPN Kota Makassar yang dihadiri Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM sebagai pihak Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memerlukan lahan dan dihadiri pula oleh saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan, dimana dalam musyawarah tersebut saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM mengaku sebagai penggarap lahan dengan menunjukkan bukti-bukti surat berupa Surat P2 Nomor: 419/P II/1974, Surat SPPT NOP. 106 tahun 2005 dan Surat SPPT NOP. 216 tahun 2005. Selanjutnya Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM menyampaikan bahwa dalam rangka Pembangunan gedung Celebes Convention Centre diperlukan lahan seluas 6 Ha yang dibiayai oleh APBD tahun 2005 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan proyek ini harus segera direalisasikan karena jika tidak segera direalisasikan maka proyek ini akan dialihkan ke Jawa Timur, selanjutnya terjadilah tawar-menawar antara saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan dengan terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM dimana dalam musyawarah tersebut saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan awalnya meminta harga sebesar Rp.120.000/m<sup>2</sup> (seratus dua puluh ribu rupiah permeter bujur sangkar) kemudian terdakwa

diminta turun menjadi Rp. 55.000/m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu rupiah per meter bujur sangkar) dan atas saran dari panitia pengadaan tanah oleh Instansi Pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Makassar dengan alasan mengingat perkembangan pembangunan Kota Makassar ke depan, akhirnya terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM sepakat dengan saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan dengan harga Rp. 57.500/m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah per meter bujur sangkar) yang kemudian ditetapkan dalam surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005 tentang penetapan bentuk dan besarnya uang santunan atas lahan yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan gedung pusat Promosi Dagang dan Industri (Celebes Convention Centre) seluas 6 Ha terletak di Jalan H. M. DG. PATOMPO (d/h jalan Metro Tanjung Bunga) Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2005 bertempat di Ruang Asisten I Pemerintah kota Makassar, Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM melakukan penyerahan uang santunan kepada saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Drs. H. ABDUL RAHIM menerima uang santunan tersebut sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai sesuai dengan berit acara pengadaan Tanah/Penyerahan santunan Nomor BA.01/CCC/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 kemudian saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM menyerahkan Bukti Surat Asli berupa surat P2 No. 419/P II/1974, Surat SPPT NOP 106 Tahun 2005 dengan surat SPPT NOP 216 Tahun 2005 kepada terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM disaksikan oleh Panitia pengadaan Tanah bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kota Makassar;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM yang telah melakukan tawar-menawar harga tanah untuk kepentingan Pembangunan Celebes Convention Center di Jalan Metro Tanjung Bunga dengan saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan, tanpa melakukan penelitian tentang kebenaran status hak atas tanah yang akan dilepaskan, dan menyetujui tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 57.500/m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah per meter bujur sangkar) kemudian membayar sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai penyerahan santunan kepada saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagai penggarap lahan, seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena tanah di Jalan Metro Tanjung Bunga tersebut diketahui oleh Terdakwa bukan tanah milik akan tetapi tanah tersebut adalah tanah tumbuh akibat pendangkalan laut yang diakui digarap oleh saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sesuai surat P2 No. 419/P II/1974, Surat SPPT NOP 106 Tahun 2005 dengan surat SPPT NOP 216 Tahun 2005. Perbuatan Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM tersebut adalah perbuatan melawan hukum bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
2. Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran berwenang;

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Keppres 55 Tahun 1993 tentang pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah dicabut dan diganti dengan peraturan Presiden RI Nomor : 36 tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 Tanggal 14 Juni 1994 Tentang ketentuan Pelaksanaan Kepres nomor : 55 Tahun 1993, yang menyatakan :

Pasal 20 :

1. Kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak tersebut dibawah ini diberikan uang santunan :
  - a. Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960;



- b. Mereka yang memakai tanah hak barat dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979;
  - c. Bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 17 angka 3 huruf b;
2. Besarnya uang santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya;

Pasal 21 :

1. Bagi yang memakai tanah selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, diselesaikan menurut ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960;
2. Dalam menyelesaikan pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia dapat menetapkan pemberian uang santunan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya supaya memerintahkan yang memakai tanah mengosongkan tanah yang bersangkutan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. M. SIDIK MALIK bersama-sama dengan saksi Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM sebagaimana diuraikan diatas, adalah perbuatan melawan hukum, yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM atau orang lain dan akibatnya menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara C.c Pemerintah Propinsi Sul-Sel sebesar Rp. 3.277.500.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak Biaya perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 172.500.000 (5% x Rp. 3.450.000.000,-) sesuai hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-

0030/PW.21/5/2007 Tanggal 04 Januari 2007 karena tidak didasari bukti Hak Garap yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undng No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korrupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Berdasarkan fakta tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang disusun secara subsidaritas yakni ;

Primer : Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidair : Sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

## **b. Tuntutan Penuntut Umum**

Setelah pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Makassar selesai, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, maka penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas 1 Makassar.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. SK Walikota Makassar Nomor : 289/Kep/644.2/2005 tanggal 6 April 2005 tentang Penetapan lokasi peruntukkan lahan Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan.
2. SK Walikota Makassar Nomor : 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005 tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan yang akan dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. SK Walikota Makassar Nomor : 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan.
4. Lampiran SK Walikota Makassar Nomor : 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan.
5. Asli surat keputusan gubernur Sulawesi Selatan No. 84/II/tahun 2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan CCC.
6. Asli Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No. 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 perihal penyiapan lahan untuk pembangunan CCC.
7. Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 256/V/1994 tanggal 10 Mei 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
8. Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (P.2) No. 419/PII/74 atas Nama Drs. ABD. HAMID

9. Asli Akta Notaris dan PPAT Hj. IRA ADRIANA ADNAN, SH No.20 tanggal 14 Juli 2005 tentang pernyataan pemilikan atas tanah hak garap (P.2) Drs. ABDUL HAMID RAHIM.
10. Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs. ABDUL HAMID RAHIM dari tahun 2000 sampai dengan 2005.
11. Foto Copy Celebes Convention Center.
12. Asli Berita Acara Pengadaan Tanah/penyerahan Santunan Nomor : B.A.01/CCC/VII/2005.
13. Asli daftar pembayaran Uang Santunan atas lahan yang terkena pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
14. Foto Copy kuitansi sebesar tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran uang santunan atas lahan yang terkena pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
15. Foto Copy surat setoran pajak atas nama wajib pajak pemegang kas Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengalihan hak tanah 5% sebesar Rp. 172.500.000,- tanggal 26 Desember 2005.
16. Foto Copy berita Acara rapat musyawarah Panitia Pengadaan tanah tanggal 11 April 2005.
17. Fot copy daftar hadir musyawarah panitia pengadaan tanah tanggal 11 April 2005.
18. Foto copy surat panitia pengadaan tanah nomor: 336/172/DPRD/2005 tanggal 8 April 2005 tentang undangan rapat untuk tanggal 11 April 2005.

19. Foto copy surat dari DPRD Kota Makassar nomor: 336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengar pendapat dan peninjauan komisi A bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar.
20. Foto Copy daftar honorarium panitia pengadaan tanah tanggal 21 Juli 2005.
21. Foto copy surat setoran pajak (SSP) untuk pajak honorarium panitia pengadaan tanah tanggal Desember 2005.
22. Foto copy kwitansi biaya intensif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp. 1.250.000,-
23. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan Nomor: 573/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 8 April 2005.
24. Foto Copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari Dharma Catering tanggal 11 April 2005.
25. Foto copy kwitansi biaya intensif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp. 2.125.000,-
26. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan Nomor: 667a/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 25 April 2005.
27. Foto copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari Dharma Catering tanggal 27 April 2005.
28. Foto copy kwitansi biaya intensif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp. 2.357.000,-
29. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan nomor: 691/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 27 April 2005.
30. Foto copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari R.M Rajawali tanggal 28 April 2005.

31. Foto copy kwitansi biaya intensif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp. 1.500.000,-
32. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan nomor: 756/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 9 Mei 2005.
33. Foto copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari Dharma Catering tanggal 10 Mei 2005.
34. Foto copy kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp.1.000.000,- Desember 2005.
35. Foto copy register pengguna uang muka kerja sebesar Rp. 1.000.000,- Desember 2005.
36. Foto copy kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp.1.000.000,-
37. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan nomor: 1432/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 19 September 2005.
38. Foto copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari Toko Agung tanggal 21 September 2005.
39. Foto copy surat tanda setoran UUDP kegiatan pembangunan pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 2005.
40. Foto copy schedule pengadaan tanah pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
41. Asli foto-foto dokumentasi pembayaran dana santunan dan lokasi CCC.
42. Foto copy surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag Nomor : 594.1/1243/SET tanggal 1 April 2005 tentang

- pengukuran tanah gedung pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
43. Foto copy surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag Nomor : 534/PDN/IV/2005 Perindag tanggal 1 April 2005 tentang permohonan penetapan lokasi.
  44. Asli surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag tanggal 3 Juli 2006 tentang permintaan data tentang pembangunan CCC Sulawesi Selatan.
  45. Foto copy peta makro situasi pemilikan lahan untuk proyek pembangunan pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
  46. Foto copy surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-873-53 tanggal 21 Juni 2010 tentang keberatan atas tidak dikabulkannya permohonan pensertifikatan tanah garapan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.
  47. Foto copy surat pernyataan pemilik tanah dari Drs. ABDUL HAMID RAHIM tanggal 14 Desember 1998.
  48. Foto copy surat pernyataan pemilik tanah dari Drs. H. ABDUL HAMID LEYO tanggal 14 Desember 1998.
  49. Foto copy schedule pembangunan CCC tanggal 21 Maret 2005.
  50. Foto copy tahapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
  51. Foto copy surat Bappeda Nomor : 005/1301/Bappeda tanggal 25 April 2005 tentang undangan rapat tanggal 25 April 2005.
  52. Foto copy surat dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor : 550.2-1056-53.01.



53. Foto copy surat dari pemerintah Kota Makassar nomor 900/639/PEM tanggal 19 Juli 2005 tentang pembayaran uang santunan yang terkena proyek CCC.
  54. Foto copy surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 tentang penyiapan lahan untuk pembangunan Convention dan Exhibition Center.
  55. Foto copy berita acara hasil rapat tentang kepemilikan lokasi rencana pembangunan CCC tanggal 20 Mei 2005.
  56. Foto copy berita acara hasil rapat tentang kepemilikan lokasi rencana pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005.
  57. Peta blok 001 dan blokk 002 Kelurahan Mattoangin.
  58. 1(satu) bundle peta lokasi Tanjung Bunga.
  59. Foto copy Surat Walikota Madya Ujung Pandang Nomor 552.11/666/Pemkot tanggal 27 Agustus 1999 tentang larangan penertiban.
  60. Foto copy peta blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2005.
  61. Asli peta blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2005.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

### **c. Pertimbangan Hakim**

Bahwa sebelum mempertimbangkan ketentan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan lebih dahulu dipertimbangkan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaannya dengan dakwaan primeir, subsidair (subsidiaritas) yaitu pasal 2 sebagai dakwaan primer dan pasal 3 sebagai dakwaan subsidair ;

Bahwa pada azasnya penyusunan dakwaan dengan subsidiaritas adalah disebabkan karena unsur pokok dari dakwaan primer dan subsidair adalah sama akan tetapi dakwaan primer mempunyai unsur khusus lebih dari unsur pokok tersebut, sehingga pada umumnya dakwaan primer yang memiliki unsur khusus tersebut memiliki ancaman hukuman yang lebih tinggi.

Bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini maka pasal 2 dengan pasal 3 undang-undang no. 31 tahun 1999 pada pokoknya dibedakan kualifikasi perbuatan pidananya yaitu : pasal 2 “Secara melawan hukum” pasal 3 “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Bahwa unsur “melawan hukum/wederrechtelijkheid” adalah merupakan unsur umum yang harus selalu ada dalam perbuatan pidana, sehingga perbuatan melawan hukum adalah merupakan “Genus (induk)” dari segala perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dengan pengertian “melawan hukum” yang demikian maka “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah juga termasuk dalam arti perbuatan melawan hukum dalam pasal 2, dengan kata lain bahwa “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah species dari perbuatan melawan hukum ;

Bahwa maka apabila cara mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa diurut dari dakwaan primer pasal 2 maka akan mengalami kesulitan karena akan

serta merta mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal 3 padahal pasal 2 dengan pasal 3 juga dibedakan ancaman hukuman ;

Bahwa terlihat cara penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini hanya karena didasarkan kepada ancaman hukuman pasal 2 yang lebih berat dari pasal 3 ;

Bahwa kalau melihat pasal 3 yang sifatnya lebih khusus dari pada pasal 2 semestinya pembuat undang-undang taat azas untuk membuat ancaman hukum pasal 3 lebih berat dari pada pasal 2 (ternyata ancaman hukuman minimal pasal 3 lebih ringan dari pasal 2) sehingga kalau menyusun surat dakwaan dapat memposisikan pasal 3 sebagai dakwaan primer dan pasal 2 sebagai dakwaan subsidair ;

Berdasarkan uraian perkara diatas maka berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, maka majelis hakim memberikan pertimbangannya.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut majelis hakim harus memandang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai dakwaan alternatif murni sehingga memungkinkan hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang akan dibuktikan terlebih dahulu ;

Bahwa memperhatikan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primer maupun subsidair dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah dalam kedudukannya sebagai kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan dan pengguna anggaran pengadaan lahan gedung CCC, maka adalah lebih tepat apabila pasal 3 jo pasal 18 undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dipertimbangkan lebih dahulu ;

Bahwa pasal 3 berbunyi sebagai berikut : “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ;

Bahwa dalam mengurai unsur dari suatu ketentuan pidana kebanyakan para praktisi diurut sesuai dengan rumusan kalimat yang ada dalam ketentuan tersebut, bahwa hal tersebut kurang tepat, karena adalah lebih baik terlebih dahulu mengedepankan unsur “perbuatan yang dilakukan” dari pada unsur “akibat dari perbuatan” dengan logika bahwa tidak ada akibat tanpa perbuatan ;

Bahwa dengan dasar pertimbangan diatas maka unsur dari pasal 3 ini yang perlu dibuktikan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana adalah ;

- Setiap orang ;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

#### **1. Unsur “Setiap Orang”**

Bahwa kata “setiap orang” ini selalu dimasukkan dalam rumusan pasal adalah merupakan penegasan ulang tentang ketentuan pemberlakuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan umum KUHP pasal 2 KUHP yang berbunyi :

“Ketentuan pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi tiap orang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum” ;

Bahwa “setiap orang” berarti siapa saja tanpa membedakan warga Negara, jenis kelamin, agama, kedudukan, kata “setiap orang” ini hanya kecualikan terhadap pemberlakuan prinsip “*extritorialiteit*” menurut hukum internasional ;

Bahwa kata “setiap orang” ini juga bermakna bahwa orang yang diperhadapkan dan didakwa di persidangan harus sesuai dengan orang yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan bukti-bukti, hal ini penting untuk menghindari salah orang ;

Bahwa pada awal persidangan ketika identitas terdakwa dalam surat dakwaan ditanyakan kepada orang yang diperhadapkan sebagai terdakwa telah ternyata terdapat persesuaian yaitu terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM ;

Bahwa demikian pula identitas lainnya dalam berkas perkara, serta atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM adalah sebagai yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Bahwa ternyata pula bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga apabila unsur delik yang menyertai unsur barang siapa terbukti maka Terdakwa dapat dijatuhi hukuman ;

## **2. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka yang dimaksud dengan :

1. Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya ;
2. Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu ;
3. Kesempatan adalah peluang ;
4. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan ;
5. Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi ;
6. Kedudukan adalah tempat pegawai tinggi untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya ;

Bahwa dengan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah ;

“Melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atas hak dan kekuasaan peluang, segala sesuatu yang dapat dipakai yang dimiliki karena pekerjaan dalam pemerintahan atau organisasi”;

Bahwa menurut NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA dalam materi yang diberikan pada Pelatihan Hakim Tipikor angkatan IV tanggal 8 September 2008 berpendapat ;

“”setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat Administrasi Negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam

hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);

Bahwa pengertian “Menyalahgunakan Kewenangan” sebagaimana dalam putusan MA No. 1340/Pid/1992 yaitu : telah menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa selaku Kepala Dinas maka yang mengatur kedudukan/jabatan dan kewenangannya adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan peraturan lain tentang pemerintahan daerah;

Bahwa berdasarkan pasal 120 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 bahwa Kepala Dinas adalah perangkat daerah dan menurut pasal 124 UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan :

1. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
2. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
3. Kepala Dinas Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Bahwa pasal 5 ayat 1 dan 2 PP No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan :

Ayat 1 : Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

Ayat 2 : Dinas Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi;

Bahwa dalam pasal 156 ayat 1 dan 2 UU No. 32 tahun 2004 mengenai Keuangan Daerah menyebutkan sebagai berikut ;

Ayat 1 : Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

Ayat 2 : Dalam melaksanakan kekuasaan sebagai pada ayat 1, kepada daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah;

Bahwa dari ketentuan yang diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta dalam persidangan adalah bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang diberi tugas oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai pengguna Anggaran pengadaan lahan gedung CCC untuk tahun APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2005, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 181/IV/tahun 2005 tanggal 1 April 2005 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas



Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pengadaan tanah untuk bangunan gedung CCC telah terlaksana dan Terdakwa telah melakukan pembayaran atasnya sebesar Rp. 3.450.000.0000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Drs. ABDUL HAMID RAHIM sesuai berita acara No. BA.01/CCC/VII/2005 pada tanggal 21 Juli 2005 disaksikan Panitia Pengadaan Tanah di Kantor Walikota diruangan Asisten Tata Praja (Sekretaris Panitia);

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa melakukan pembayaran tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak;

Bahwa untuk membuktikan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu ;

a. Latar belakang pengadaan tanah;

b. Proses pengadaan tanah;

Bahwa latarbelakang pengadaan tanah adalah merupakan rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun gedung yang diperuntukkan pada kegiatan Pusat Promosi Perdagangan dan Perindustrian yang perskala Nasional dan International yang diberi nama Celebes Convention Centre;

Bahwa dalam rangka mewujudkan rencana tersebut Gubernur telah mengeluarkan :

1. Keputusan No. 84/II/Tahun 2005 tanggal 3 maret 2005 tentang pembentukan Tim Kordinasi Pembangunan CCC;
2. Surat yang ditujukan kepada Walikota Makassar tanggal 17 maret 2005 No.593/1007/EkBang perihal “penyiapan lahan untuk pembangunan

Convention dan Exhibition Center. Dalam surat mana telah ditunjuk tanah yang akan diproses pengalihan haknya dan siapa yang menguasai dan menggarapnya;

3. Surat Sekda Provinsi Sulawesi Selatan No. 594.1/1243/SET tanggal 1 April 2005 kepada Kepala BPN Kota Makassar perihal pengukuran tanah CCC;

Bahwa dari fakta ini maka sebelum Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan (Terdakwa) ditunjuk selaku pengguna anggaran yaitu berdasarkan SK Gubernur No. 181/IV/tahun 2005 tanggal 1 April 2005, maka proses untuk pengadaan tanah gedung CCC telah dilakukan Gubernur, sebabnya surat yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 1 April 2005 No. 534/PDN/IV/2005/Indag tentang permohonan penetapan lokasi yang ditujukan kepada Walikota Makassar isinya adalah untuk menindak lanjuti surat Gubernur No. 593/1007/Makassar, kepala Dinas adalah sebagai pelaksana tugas yang diberikan Gubernur selaku penanggungjawab anggaran;

Bahwa atas surat Gubernur dan terdakwa selaku Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan maka panitia pengadaan tanah yang pembentukkannya didasarkan kepada SK Gubernur No. 256/V/1994 tanggal 10 Mei 1994 telah melakukan kegiatan-kegiatan rapat-rapat antara lain :

- Rapat tanggal 11 April 2005 atas surat undangan panitia pengadaan tanah tanggal 8 April 2005 yang dihadiri oleh panitia pengadaan tanah, Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM (pemilik/penggarap) dan terdakwa;
- Rapat penyerahan uang santunan tanggal 21 Juli 2005;

Bahwa atas surat Gubernur dan terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut dan atas hasil rapat panitia pengadaan tanah maka Walikota telah menerbitkan beberapa keputusan yaitu :

1. SK No : 289/Kep/644.2/2005 tanggal 6 April 2005 tentang penetapan lokasi peruntukkan lahan pembangunan gedung Pusat Promosi dagang dan industri Sulawesi Selatan (Celebes Convention Center) seluas 6 Ha terletak di Jalan HM. DG PATOMPO (dahulu Metro Tanjung Bunga) Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
2. SK No : 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005, tentang penetapan bentuk dan besaran uang santunan ;
3. SK No : 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi lahan;

Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian melakukan pembayaran atas dasar SK Walikota No. 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005 dan surat Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar selaku Sekretaris 1 panitia pengadaan tanah (Drs. H. M. TADJUDDIN NOOR, Msi) No.900/639/PEM tanggal 19 Juli 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengguna Anggaran untuk melakukan pembayaran santunan, telah melakukan pembayaran pengadaan tanah tersebut kepada Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM tanggal 21 Juli 2005 ;

Bahwa kalau Gubernur dan kepala dinas perindag provinsi Sulawesi Selatan bersurat kepada Walikota Makassar perihal tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum gedung CCC maka hal itu telah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf M jo pasal 6 Kepres 55 tahun 1993;

Bahwa dengan bersuratnya Gubernur dan Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan kepada Walikota selaku Ketua Pengadaan tanah maka sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Kepres 55 tahun 1993 tentang penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan

dokumen yang mendukungnya menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan tanah, karena hukum ;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas tidak ada kewajiban hukum bagi instansi yang bersangkutan lagi untuk meneliti ulang apa yang telah dilakukan panitia pengadaan tanah tentang status hukum tanah;

Bahwa kesalahan dalam keputusan panitia pengadaan tanah tentang yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 adalah tanggung jawab hukum dari panitia pengadaan tanah yang mengeluarkan keputusan ;

Bahwa tentang hak dan kewenangan pengguna anggaran untuk meneliti kebenaran dokumen yang dimaksudkan oleh pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara telah dilakukan terdakwa dengan melimpahkannya kepada panitia pengadaan tanah sebagaimana telah pertimbangan diatas;

Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004 telah menyebutkan bahwa pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD (SK Walikota No : 289/Kep/644.2/2005 dan No : 320/Kep/593.83/2005) bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, dalam hal ini adalah panitia pengadaan tanah;

Bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut diatas pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi ahli baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan terdakwa yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian Negara pengadaan tanah gedung CCC adalah panitia pengadaan tanah, karena tugas dan tanggung jawabnya menurut ketentuan perundang-undangan;

Bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa karena salah satu unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka oleh karenanya bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didepan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipandang sebagai dakwaan alternatif, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 2009 yang diubah UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai berikut;

Bahwa pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah UU No. 20 tahun 2001 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);

Bahwa untuk dapat dipidana dengan ketentuan ini maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah UU No. 20 tahun 2001 dan telah dinyatakan terbukti, maka pada dakwaan ini diambil alih menjadi pertimbangan dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan”

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dimuka bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukum adalah induk (*genus*) dari segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa dalam kasus ini terdakwa diajukan ke persidangan adalah karena selaku Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan pengguna anggaran dalam pengadaan tanah untuk gedung CCC, dimana dalam pertimbangan dakwaan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah UU No. 20 tahun 2001 telah dinyatakan tidak terbukti bersalah “meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum telah dinyatakan tidak terbukti maka serta merta pula unsur perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Karena salah satu dari unsur pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu

dibuktikan lagi, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maka sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP terdakwa harus diputus bebas;

Karena terdakwa diputus bebas maka berdasarkan pasal 97 ayat 1, 2 KUHAP jo pasal 14 ayat 1 PP 27 tahun 1983 terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Bahwa karena terdakwa diputus bebas dan karena terdakwa berada dalam status tahanan maka berdasarkan pasal 191 ayat 3 KUHAP terdakwa harus dibebaskan seketika dari tahanan;

Bahwa karena terdakwa diputus bebas maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa tentang barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berupa surat : 1 sampai 61 untuk kepentingan berkas perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

#### **d. Amar Putusan**

Memperhatikan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah UU No. 20 tahun 2001, KUHP, KUHAP, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, PP No. 8 tahun 2003, Kepres 55 tahun 1993 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Drs. M. SIDIK SALAM tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair/subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan terdakwa seketika dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. SK Walikota Makassar Nomor : 289/Kep/644.2/2005 tanggal 6 April 2005 tentang Penetapan lokasi peruntukkan lahan Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan.
  2. SK Walikota Makassar Nomor : 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005 tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan yang akan dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
  3. SK Walikota Makassar Nomor : 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan.
  4. Lampiran SK Walikota Makassar Nomor : 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan.
  5. Asli surat keputusan gubernur Sulawesi Selatan No. 84/II/tahun 2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan CCC.
  6. Asli Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No. 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 perihal penyiapan lahan untuk pembangunan CCC.



7. Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 256/V/1994 tanggal 10 Mei 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
8. Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (P.2) No. 419/PII/74 atas Nama Drs. ABD. HAMID
9. Asli Akta Notaris dan PPAT Hj. IRA ADRIANA ADNAN, SH No.20 tanggal 14 Juli 2005 tentang pernyataan pemilikan atas tanah hak garap (P.2) Drs. ABDUL HAMID RAHIM.
10. Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs. ABDUL HAMID RAHIM dari tahun 2000 sampai dengan 2005.
11. Foto Copy Celebes Convention Center.
12. Asli Berita Acara Pengadaan Tanah/penyerahan Santunan Nomor: B.A.01/CCC/VII/2005.
13. Asli daftar pembayaran Uang Santunan atas lahan yang terkena pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
14. Foto Copy kuitansi sebesar tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran uang santunan atas lahan yang terkena pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
15. Foto Copy surat setoran pajak atas nama wajib pajak pemegang kas Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengalihan hak tanah 5% sebesar Rp. 172.500.000,- tanggal 26 Desember 2005.
16. Foto Copy berita Acara rapat musyawarah Panitia Pengadaan tanah tanggal 11 April 2005.

17. Fot copy daftar hadir musyawarah panitia pengadaan tanah tanggal 11 April 2005.
18. Foto copy surat panitia pengadaan tanah nomor : 336/172/DPRD/2005 tanggal 8 April 2005 tentang undangan rapat untuk tanggal 11 April 2005.
19. Foto copy surat dari DPRD Kota Makassar nomor: 336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengar pendapat dan peninjauan komisi A bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar.
20. Foto Copy daftar honorarium panitia pengadaan tanah tanggal 21 Juli 2005.
21. Foto copy surat setoran pajak (SSP) untuk pajak honorarium panitia pengadaan tanah tanggal Desember 2005.
22. Foto copy kwitansi biaya intensif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp. 1.250.000,-
23. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan Nomor: 573/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 8 April 2005.
24. Foto Copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari Dharma Catering tanggal 11 April 2005.
25. Foto copy kwitansi biaya intensif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp. 2.125.000,-
26. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan Nomor: 667a/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 25 April 2005.
27. Foto copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari Dharma Catering tanggal 27 April 2005.

28. Foto copy kwitansi biaya intensif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp. 2.357.000,-
29. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan nomor: 691/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 27 April 2005.
30. Foto copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari R.M Rajawali tanggal 28 April 2005.
31. Foto copy kwitansi biaya intensif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp. 1.500.000,-
32. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan nomor: 756/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 9 Mei 2005.
33. Foto copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari Dharma Catering tanggal 10 Mei 2005.
34. Foto copy kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp.1.000.000,- Desember 2005.
35. Foto copy register pengguna uang muka kerja sebesar Rp. 1.000.000,- Desember 2005.
36. Foto copy kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp.1.000.000,-
37. Foto copy nota pesanan barang/pekerjaan nomor: 1432/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 19 September 2005.
38. Foto copy berita acara serah terima barang/pekerjaan dari Toko Agung tanggal 21 September 2005.
39. Foto copy surat tanda setoran UUDP kegiatan pembangunan pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 2005.

40. Foto copy schedule pengadaan tanah pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
41. Asli foto-foto dokumentasi pembayaran dana santunan dan lokasi CCC.
42. Foto copy surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag Nomor : 594.1/1243/SET tanggal 1 April 2005 tentang pengukuran tanah gedung pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
43. Foto copy surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag Nomor : 534/PDN/IV/2005 Perindag tanggal 1 April 2005 tentang permohonan penetapan lokasi.
44. Asli surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag tanggal 3 Juli 2006 tentang permintaan data tentang pembangunan CCC Sulawesi Selatan.
45. Foto copy peta makro situasi pemilikan lahan untuk proyek pembangunan pusat promosi dagang dan industry Sulawesi Selatan.
46. Foto copy surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-873-53 tanggal 21 Juni 2010 tentang keberatan atas tidak dikabulkannya permohonan pensertifikatan tanah garapan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.
47. Foto copy surat pernyataan pemilik tanah dari Drs. ABDUL HAMID RAHIM tanggal 14 Desember 1998.
48. Foto copy surat pernyataan pemilik tanah dari Drs. H. ABDUL HAMID LEYO tanggal 14 Desember 1998.
49. Foto copy schedule pembangunan CCC tanggal 21 Maret 2005.
50. Foto copy tahapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

51. Foto copy surat Bappeda Nomor : 005/1301/Bappeda tanggal 25 April 2005 tentang undangan rapat tanggal 25 April 2005.
52. Foto copy surat dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor : 550.2-1056-53.01.
53. Foto copy surat dari pemerintah Kota Makassar nomor 900/639/PEM tanggal 19 Juli 2005 tentang pembayaran uang santunan yang terkena proyek CCC.
54. Foto copy surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 tentang penyiapan lahan untuk pembangunan Convention dan Exhibition Center.
55. Foto copy berita acara hasil rapat tentang kepemilikan lokasi rencana pembangunan CCC tanggal 20 Mei 2005.
56. Foto copy berita acara hasil rapat tentang kepemilikan lokasi rencana pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005.
57. Peta blok 001 dan blokk 002 Kelurahan Mattoangin.
58. 1(satu) bundle peta lokasi Tanjung Bunga.
59. Foto copy Surat Walikota Madya Ujung Pandang Nomor 552.11/666/Pemkot tanggal 27 Agustus 1999 tentang larangan penertiban.
60. Foto copy peta blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2005.
61. Asli peta blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

## **2. Analisis Penulis**

Jika diperhatikan keseluruhan uraian di atas mulai dari duduk perkara, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim sampai keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, maka untuk mengetahui objek penelitian (studi kasus) dalam penulisan skripsi ini sudah tepat atau belum terlebih dahulu ditinjau hal-hal sebagai berikut :

### **a. Dakwaan Penuntut Umum**

Menurut hemat penulis, penuntut umum pada dasarnya telah salah dalam menerapkan pasal yang ada dalam dakwaannya. Karena salah satu unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dikarenakan terdakwa selaku Kepala Dinas telah menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan peraturan lain pemerintah daerah, berdasarkan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pelaksana otonomi daerah, pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **b. Tentang Tuntutan Penuntut Umum**

Penuntut umum berdasarkan dakwaan (fungsi surat dakwaan sebagai dasar pengajuan tuntutan bagi penuntut umum) yang menurutnya salah satu pasal dalam dakwaan penuntut umum terbukti, telah menuntut terdakwa sebagaimana bunyi tuntutan penuntut umum dalamuntutannya.

Berdasarkan tuntutan penuntut umum, menurut hemat penulis tetap akan berjalan sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Karena berdasarkan tata urutan persidangan setelah pembacaan dakwaan penuntut umum, eksepsi dari penasihat hukum, pemeriksaan saksi-saksi maupun pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa telah selesai maka dilanjutkan dengan tuntutan yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum.

### **c. Tentang Putusan Majelis Hakim**

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 576/PID.B/2010/PN. Makassar yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum dan membebaskan terdakwa. Berdasarkan putusan tersebut penulis menganggap bahwa hakim sudah menjalankan tugasnya sesuai hukum acara pidana, karena setelah semua proses persidangan telah selesai maka tiba giliran majelis hakim memberikan putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis dengan pertimbangan dan keyakinannya sudah tepat memutus perkara pidana dengan putusan bebas sebagaimana hukum yang berlaku.

## **B. Konsekuensi Upaya Hukum Kasasi Mengenai Putusan Bebas**

Putusan bebas dapat diartikan suatu putusan dimana terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Dalam arti lain terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana".

Setelah putusan bebas diucapkan dan sidang telah selesai akibat hukumnya adalah terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum walaupun putusan bebas tersebut masih diupayakan kasasi oleh jaksa penuntut umum (belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap). Terdakwa juga berhak menuntut ganti kerugian atas penahanannya selama ini (pasal 95 KUHAP).

Dalam hal ini kalau kita merujuk pada KUHAP jawabnya adalah tidak dapat diupayakan, termasuk upaya hukum kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi :

"Terhadap putusan perkara yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan bebas ternyata masih dapat diupayakan hukum kasasi, tetapi harus didasarkan pada situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran. Misalnya dalam kasus korupsi lalu oleh hakim diputus bebas. Jika kita hanya berpedoman pada pasal 244 KUHAP berarti putusan final. Ini tentu bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran, terutama masyarakat maupun Negara. Dalam hal ini bisa saja putusan bebas terjadi karena tidak profesionalnya majelis hakim atau mungkin terjadi penyalahgunaan wewenang (suap, dll). Dengan adanya keputusan menteri kehakiman diatas dan kemudian diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah



Agung sebagaimana dalam perkara No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 atas nama kasus terdakwa Natalegawa maka putusan pengadilan tingkat pertama masih dapat di koreksi atau ditinjau kembali di tingkat Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi.

Sedangkan untuk barang bukti yang disita tersebut sesudah sidang selesai apabila terdapat "alasan yang sah" maka dapat dikembalikan kepada yang berhak, walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena adanya kasasi. Jadi tidak perlu menunggu putusan yang mempunyai kekuatan tetap. Dalam arti kata barang bukti yang disita tersebut dapat diambil dengan catatan ada alasan yang sah. Adapun alasan-alasan sah tersebut diatur dalam penjelasan pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP yang intinya sebagai berikut :

- a. Jika barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain sebagainya.
- b. Jika pengembalian barang bukti tersebut perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus disertai syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.
- c. Jika pengembalian barang bukti tersebut perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak perlu ada persyaratan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP diatas, seandainya ingin mengambil barang bukti tersebut dan terdakwa yang berhak terhadap barang bukti sebagaimana bunyi amar putusan pengadilan namun tetap ditahan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan kasasi sedangkan terdakwa sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP. Maka dalam hal ini jaksa penuntut umum kurang berlaku adil dan manusiawi pada terdakwa, apalagi barang bukti tersebut digunakan untuk mencari nafkah terdakwa dan sumber kehidupan.

Selanjutnya jika terdakwa merasa ada kerugian akibat ditahannya barang buktinya tersebut maka terdakwa yang diputus bebas dapat menuntut kerugian secara perdata atas ditahannya barang buktinya tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang sudah menentukan tuntutan ganti kerugian misalnya pasal 1365 KUHPerdata, sepanjang kita dapat membuktikan adanya kerugian tersebut. Namun perlu diketahui tuntutan ganti kerugian yang ada hubungan tindak pidana tentu harus mempunyai dasar hukum kuat. Jika hukum pidananya lebih kuat tentu hukum perdata dikesampingkan.

Berkaitan perkara Terdakwa yang diputus bebas tersebut pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHP dapat dijadikan dasar telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh jaksa penuntut umum sehingga dijadikan alasan hukum untuk menuntut ganti rugi tersebut. Dengan catatan setelah hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang sah dan selanjutnya dalam putusannya mencantumkan penetapan supaya barang bukti diserahkan kepada yang berhak segera setelah sidang selesai. Dengan demikian tidak ada lagi hak jaksa penuntut umum untuk menahan barang bukti terdakwa yang diduga selama ini sebagai barang bukti tindak kejahatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984. Petunjuk Mahkamah Agung RI dan angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983. Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dan berdasarkan pula pada situasi, kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran. Maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung. Terkait dengan kasus yang penulis bahas secara teori dan penerapannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang disertai memori kasasi.
2. Konsekuensi yang dihadapi dalam upaya hukum kasasi mengenai putusan bebas ialah terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum pada saat itu juga, meskipun masih dilakukan upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan alasan yang sah sebagaimana telah diatur dalam pasal 194 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP yang intinya adalah apabila barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan maupun alat pertanian.

## B. *Saran*

1. Demi adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang, pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) hendaknya mereformulasikan secara jelas esensi Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni dengan merumuskan secara pasti mengenai adanya hak bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan penafsiran dalam menyelesaikan kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas dan Hakim juga tidak melakukan tindakan *contra legem* untuk menyelesaikan kasus-kasus putusan bebas tersebut.
2. Untuk masa yang akan datang, pembentuk KUHAP hendaknya merumuskan juga bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas, prosedurnya seharusnya melalui tahapan upaya hukum banding terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini dengan maksud agar putusan tersebut tersaring kebenarannya dan agar tidak terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fokusindo Mandiri, *KUHP dan KUHP (edisi Revisi 2010)*.
- Gerry Rizki, Muhammad. *KUHP dan KUHP*. Permata Pres, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum dalam Praktek Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Hart, H.L.A. dan Tony Honore. *Causation In The Law*. New York: Oxford University Press, 1985.
- Jonkers, JE. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta : PT Bina Akasara, 1987.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. III ; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- M. Husein, Harun. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. V; Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Moerad, Poentang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung : PT. Alumni, 2011.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Pompe, W.P.J. *Handboek Van Het Nederlandse Straffrecht*. Tjeenk Willin, vijfde herziene dr., Zwolle, 1959.
- Rifa'i, Amzulian. *Wajah Hakim dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII, 2005.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1985.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2009.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Ahaem-Petehaem, 1996.
- Silaban, M.H. *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*. Jakarta : CV Sumber Ilmu Jaya, 1997.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Simons, D. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*. Groningen: Eerste Deel. Vierde druk. P.Noordhoff, 1921.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : Politeia, 1995.
- Suparni, Niniek, dkk. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU no. 31 Tahun 1999 Jo. UU no. 20 tahun 2001*. Jakarta : LIPI Press, 2008.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Edisi Kedelapan. Yogyakarta : Indonesia Tera, 2011.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Zainal Abidin Farid, Andi. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.